



Swantara

Majalah Triwulanan Lemhannas RI No. 22 Tahun VI/September 2017



Laporan
Studi Strategis Luar Negeri
(SSLN) PPRALVI
Lemhannas RI

**REFLEKSI PERAN
DAN FUNGSI
LEMHANNAS RI**

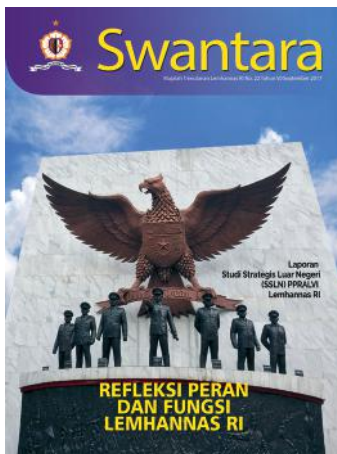
Selamat



HARI KESAKTIAN PANCASILA

1 OKTOBER 2017

*Bangsa adalah satu jiwa yang melekat
pada sekelompok manusia yang merasa
dirinya bersatu karena mempunyai nasib
dan penderitaan yang sama
pada masa lampau dan mempunyai cita-cita*



PELINDUNG AGUS WIDJOJO

PEMBINA BAGUS PURUHITO

PENGARAH ARIEF WACHYUNADI, ALBERT
INKIRIWANG, TONY S.B. HOESODO

PENANGGUNGJAWAB MINDARTO

REDAKTUR WAHYU WIDJI PAMUNGKAS

PENYUNTING/EDITOR HENDRAWAN SETIADI, LINDA
PURNAMASARI

DESAIN GRAFIS BAMBANG IMAN ARYANTO, YANWAR
ABIDIN RAKINDA

KOORDINATOR FOTOGRAFER M. ISDAR

FOTOGRAFER SURYADI, SUYONO

SEKRETARIAT ADLANSYAH M, HERU SEPTOWIDODO,
GATOT, MARDIANA PRIHATINI, YUSNADI, DASWATI,
JEMARI, YATIK WULANDARI

PENULIS ARTIKEL ENDAH HELIANA, CAHYAQADRI
HILDAMONA, MAGISTA DIAN, NI MADE VIRA, AISYAH
SALSABILA, FATIKHATUR RIZQI

ALAMAT REDAKSI LEMHANNAS RI, JL. MERDEKA
SELATAN NO. 10 JAKARTA

TELP. (021) 3832108, 3832109

FAX. (021)-3451926

EMAIL humas@lemhannas.go.id

WEBSITE www.lemhannas.go.id

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Swantara menerima artikel dan opini dari luar
Lemhannas RI dan akan dimuat apabila sesuai dengan
kebijakan redaksi

Catatan Redaksi

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Majalah Swantara Edisi ke-22 bulan September 2017, kembali hadir di tengah-tengah para pembaca.

Pada edisi ke-22 ini, redaksi berusaha terus meningkatkan kualitas, baik konten maupun layout agar lebih segar dan mampu memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelembagaan dan memberikan pesan yang sarat makna kepada pembaca. Selain kegiatan kelembagaan, redaksi juga mengangkat profil pegawai teladan Lemhannas RI tahun 2017. Melalui sosok tersebut, kami berharap dapat memberikan inspirasi dan teladan bagi para pembaca dalam mewujudkan cita-cita dan harapan.

Redaksi menyadari jika penyusunan penerbitan Majalah Swantara edisi kali ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kami tetap mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang akan kami sajikan pada edisi mendatang. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 22 kali ini.

Semoga, Majalah Swantara tetap berkesan di hati para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera
Om Shanti Shanti Shanti Om



Salam Ketahanan Nasional

Lemhannas RI mengemban peran dan fungsi dalam membina dan mengembangkan ketahanan nasional melalui doktrin wawasan nusantara. Dalam perwujudannya, Lemhannas RI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tuntutan tugas pokok dan fungsi yang diembannya yaitu menyelenggarakan program pendidikan pimpinan tingkat nasional, program pengkajian strategis, dan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Seiring dengan bertambahnya usia Lemhannas yang telah berdiri selama 52 tahun, Majalah Swantara sebagai majalah lembaga pada edisi ke-22 ini menampilkan ulasan tentang refleksi peran dan fungsi Lemhannas RI sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mempertahankan empat konsensus negara di tengah-tengah terpaan dinamika global.

Seperti kita ketahui bersama, bangsa ini lahir dari hasil kerja keras para *founding fathers*, dan setelah kemerdekaanpun bangsa ini mengalami berbagai pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengambil hikmah kemerdekaan dan sejarah bangsa Indonesia, diharapkan Lemhannas RI ke depan dapat berkontribusi dengan lebih baik lagi bagi bangsa ini.

Salah satu tugas Lemhannas RI dalam kontribusinya kepada bangsa adalah dengan mendidik calon pemimpin nasional agar *aware* terhadap geopolitik kawasan dan internasional. Belum lama ini, Lemhannas berkesempatan mengundang Duta Besar Indonesia untuk Myanmar yang membahas krisis kemanusiaan di ASEAN dan juga kedatangan Menko Bidang Kemaritiman RI yang menyampaikan ceramahnya di hadapan para peserta pendidikan Lemhannas. Diharapkan, para peserta pendidikan Lemhannas nantinya mampu menjadi pengambil kebijakan yang memiliki pemikiran strategis dan berwawasan nusantara. Pemimpin nasional yang berpikiran strategis dan berwawasan nusantara merupakan modal penting bangsa dalam menjaga dan membina ketahanan nasional.

Gubernur Lemhannas RI

daftar isi

ULASAN



06 Refleksi Peran dan Fungsi Lemhannas RI



10 Pasang Surut Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Masyarakat Indonesia



12 Pahit Getirnya Bangsa Indonesia Mencapai Cita-Cita Kemerdekaan

PROFIL

36 Sosok Sederhana di Balik Pegawai Teladan Lemhannas 2017



SUARA ALUMNI

38 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme



SEPUTAR KITA



14 Perkembangan Krisis Kemanusiaan Rohingya



18 CDSS Australia dan Lemhannas RI Diskusikan Penanggulangan Terorisme



20 Kunjungan National Defence College (NDC) India ke Lemhannas RI



21 Laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) PPRA LVI Lemhannas RI



27 Potensi Laut Indonesia Baru Tereksplorasi 8%



28 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional



30 PPSA XXI Jalin Kerjasama dengan Media terkait Publikasi Seminar Nasional



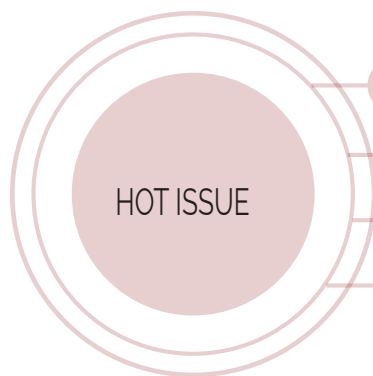
31 Olah Sismennas XLV, Koordinasi Lintas Sektoral dalam Menyikapi Dinamika Sosial



32 Lemhannas Turut Aktif dalam Tim SIMAN (Sinergi Media Sosial Aparatur Negara)



34 Pra Seminar PPSA XXI Bicarakan Aktualisasi Pancasila



42 Penyesalan Indonesia Atas Krisis Kemanusiaan di Myanmar

44 Serangan Berdarah di Barcelona

45 Bantahan Qatar Larang Pesawat Haji Riyadh Mendarat di Doha

46 Uji Coba Nuklir Ke-6 Korea Utara Berbuntut Sanksi PBB

INSPIRASI

40 Kisah Yu Timah

INTERMEZZO

48 Langkah Sederhana Usir Stress Saat Bekerja

49 GALLERY



Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.I.P., M.Sc.
 Tenaga Profesional Bidang Geostrategis
 dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI

Refleksi Peran dan Fungsi Lemhannas RI

Usia ke-52 merupakan waktu yang cukup dewasa bagi sebuah lembaga negara dalam mengemban peran dan fungsi yang diamanatkan. Dalam mewujudkan peran serta fungsinya, Lemhannas RI secara berkelanjutan menyusun berbagai program kegiatan antara lain seperti menyiapkan dan memantapkan kader-kader pimpinan tingkat nasional, menghasilkan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia dari hasil kajian berbagai isu strategis baik nasional maupun internasional, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Menilik sejarah didirikannya Lemhannas RI pada 20 Mei 1965, Presiden



Orientasi Pimpinan (ORPIM) KNPI dilaksanakan di Lemhannas RI untuk memperluas wawasan nasional

Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dan dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia saat ini, dan di masa yang akan datang.

pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno melihat keadaan bangsa yang cenderung terkotak-kotak karena pada masa tersebut Indonesia masih menerapkan sistem multipartai.

Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP., M.Sc., Tenaga Profesional Bidang Geostrategis dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI menyebutkan, “Pada masa awal kemerdekaan, kehidupan bangsa terkesan terkotak-kotak, hal ini dipengaruhi oleh kuatnya budaya primordial dan paternalistik, di mana rakyat mengikuti apa yang menjadi keinginan pimpinan pada masa ini. Oleh sebab itu, Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno menyikapi kondisi tersebut dengan mendirikan Lembaga Pertahanan Nasional yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Ketahanan Nasional.

Berkaitan dengan pendirian lembaga tersebut, Bung Karno dalam ceramah perdananya mengatakan, *“Rancanglah pertahanan nasional Indonesia dengan cara sendiri dengan mempelajari kondisi geografi, budaya, dan manusianya sebigga dapat diwujudkan bagaimana pertahanan nasional Indonesia yang paling tepat. Dan bahwa di Lemhannas itu tidak hanya belajar kekuatan militer saja, atau kekuatan bedil saja.”* Maka sejak itu, semua komponen bangsa, baik

militer maupun sipil diwajibkan mengikuti program-program yang diselenggarakan Lemhannas RI.

Lemhannas RI Menyikapi Gejolak Pasca Reformasi

Berbicara mengenai peran dan fungsi yang diemban oleh Lemhannas RI, pada masa awal terbentuk, Lemhannas RI hanya memiliki dua tugas pokok, yakni pengkajian dan pendidikan. Dua fungsi ini saling bersinergi dan tidak terpisah. Pada pasca reformasi, muncul kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasi dan mengatakan bahwa, “Indonesia tidak lagi membutuhkan Pancasila, karena Pancasila tidak berhasil menyjahterakan masyarakat.”

Pernyataan tersebut berdampak padabuburnya BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang selanjutnya program P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) tidak pernah lagi diselenggarakan sehingga sempat terjadi kekosongan, di mana tidak ada lagi institusi yang melakukan kajian terhadap perkembangan Pancasila dan implementasinya.

Kondisi ini mendapat perhatian pimpinan Lemhannas saat itu (Prof.

Dr. H. Muladi, S.H), kemudian beliau mengumpulkan staf antara lain Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP., M.Sc., dan Irjen Pol (Purn) Sunarko, untuk mendiskusikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat itu dari perspektif Pancasila sebagai Ideologi Nasional, Dasar Negara dan Falsafah Negara.

Hasil dari kajian itu menghasilkan satu kesimpulan, bahwa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dan dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia saat ini, dan di masa yang akan datang. Kondisi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut di atas sesungguhnya bukanlah dampak dari nilai-nilai Pancasila tidak lagi sesuai dengan kebutuhan bangsa, tetapi bangsa Indonesia-lah yang tidak murni dan konsekuen melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya.

Melihat keadaan tersebut, maka Lemhannas ‘jemput bola’ mengembangkan organisasi Lemhannas di mana pada saat itu pimpinan Lemhannas RI membentuk satu ke deputian yang sekarang disebut sebagai Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Istilah nilai-nilai kebangsaan merujuk kepada pidato Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana dalam memperingati hari lahirnya Pancasila 1

Jika ketiga fungsi Lemhannas mampu terealisasi, harapannya akan terjadi harmonisasi, toleransi, dan ketaatan hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Juni 2016, Presiden SBY mengatakan bahwa kita bangsa Indonesia yang bersifat majemuk perlu menghormati dan melaksanakan empat konsensus dasar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Hal ini juga disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar.

“Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa untuk memperbaiki fenomena bangsa dan negara saat ini tidak hanya dilakukan oleh Lemhannas sendiri, tetapi juga harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa,” Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar melanjutkan. Ia juga

menambahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lemhannas RI, yang perlu diperkuat saat ini adalah bagaimana agar ketiga fungsi utama Lemhannas RI yaitu lembaga pendidikan calon pemimpin, lembaga pengkajian strategis nasional, dan lembaga pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam hal menjalankan fungsi kependidikan kepemimpinan nasional, Lemhannas RI bertugas membangun, dan memantapkan calon-calon pimpinan nasional yang mampu melaksanakan kebijakan nasional berdasarkan hasil pengkajian. Tentunya dengan tujuan mewujudkan ideologi Pancasila sebagai sistem nilai nasional, yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, para calon pimpinan nasional harus memiliki kemampuan “Geoleadership”, yakni kepemimpinan yang didasarkan pada pertimbangan geografis dan segala isinya.

Kondisi saat ini yang sedang berkembang di masyarakat yakni permasalahan yang bersifat intoleransi. Lemhannas RI yang berfungsi menyelenggarakan pengkajian dan kemudian memberi masukan kepada Presiden, sedangkan yang memutuskan menjadi satu kebijakan adalah Pimpinan Nasional (Presiden). Hal yang menjadi



Mayjen TNI (Purn) Ir. Sary Sutaat
 Tenaga Profesional Bidang Geostrategis
 dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI

pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan adalah jangan sampai kebijakan tersebut mengganggu berjalannya pembangunan nasional. Dalam hal fungsi sosialisasi pematapan nilai-nilai kebangsaan maka perlu menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kebebasan demokrasi, dan mengutarakan pendapat menjadi salah satu faktornya.

Jika ketiga fungsi tersebut mampu terealisasi, harapannya akan terjadi harmonisasi, toleransi, dan ketaatan hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan pula Lemhannas RI tetap mampu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah dan mampu mencari solusi dengan tetap berpegang pada aturan, tetapi bukan larut dalam dinamika.

Menanggapi kondisi tersebut Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI (Purn) Sary Sutaat mengatakan sejauh ini peran dan fungsi Lemhannas sudah berhasil namun outputnya tergantung pada individu para pimpinan nasional, karena tugas Lemhannas adalah memberikan bekal kepada para calon pimpinan nasional dengan harapan para calon pimpinan tersebut mampu menerapkan ilmu pada penerapan praktik pelaksanaan. Adapun para calon pemimpin melaksanakan atau tidak implementasi bekal yang didapat, bukanlah tanggung jawab dari Lemhannas. Namun demikian Lemhannas tetap memberikan pemantauan evaluasi. Evaluasi tersebut untuk peninjauan kembali apakah metoda, materi dan sasaran yang dilakukan sudah tepat.

Sepanjang para calon pimpinan dalam masa pendidikan dan dinyatakan lulus dengan berbagai tahapan sebelumnya maka dinyatakan paham tentang enam kor Lemhannas yang berkaitan dengan Pancasila, UUD



45, wawasan nusantara, ketahanan nasional, kepemimpinan nasional, sistem manajemen nasional, dan kewaspadaan nasional. Enam core Lemhannas merupakan alat untuk memecahkan masalah-masalah, baik selama di pendidikan kemudian disimulasikan dengan masalah sesungguhnya, ataupun kelak nanti sesuai peran dan jabatannya masing-masing.

Mayjen TNI (Purn) Sary Sutaat berharap agar para pemangku kepentingan Lemhannas menyadari bahwa perkembangan global regional yang sangat cepat harus dapat diantisipasi

dengan sigap memilih dikaitkan dengan konteks kepentingan nasional. Sehingga bisa dapat menentukan mana yang bisa jadi peluang dan kendala.

Jika ketiga fungsi Lemhannas mampu terealisasi, harapannya akan terjadi harmonisasi, toleransi, dan ketaatan hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan pula Lemhannas tetap mampu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah dan mampu mencari solusi dengan tetap berpegang pada aturan, tetapi bukan larut dalam dinamika. [AS/YA]



Pasang Surut Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Masyarakat Indonesia



Mayjen TNI (Purn) Ibnu Triwidodo, S.I.P
Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan
Nasional Lemhannas RI

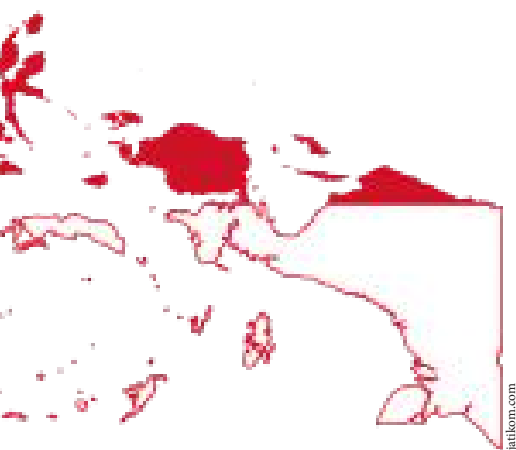
Proklama si
Kemerdekaan Bangsa Indonesia
sudah berlalu semenjak 72 tahun silam. Ideologi
Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa hingga saat ini. Namun dalam
perjalanannya, bangsa Indonesia mengalami dinamika dan pasang
surut ideologi yang kadangkala mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa. Keberadaan Pancasila, tidak hanya sebagai suatu ideologi
negara, namun dijadikan pula sebagai dasar falsafah hidup bangsa, asas
persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, serta nilai luhur bangsa.

Seperti yang dipaparkan oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang
Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Ibnu
Triwidodo, S.I.P., “Sejak diproklamirkan kemerdekaan, bangsa
Indonesia tidak pernah berganti ideologi, yakni ideologi Pancasila.
Pancasila disini oleh para *founding father* kita diangkat dari
nilai-nilai luhur bangsa, yakni nilai-nilai yang diakui oleh
seluruh bangsa Indonesia bahwa itu adalah nilai kebaikan,”
Mayjen TNI Ibnu Triwidodo menjelaskan.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila
antara lain, nilai budi pekerti, etika, gotong royong, dan
ketuhanan. Itu semua dirumuskan “Bangsa adalah satu

jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena mempunyai nasib dan penderitaan yang sama pada masa lampau dan mempunyai cita-cita yang sama tentang masa depan.” Implementasinya dalam kehidupan bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai cita-cita yang dimaksud.

Seiring berjalannya waktu, penting untuk memperkuat identitas bangsa dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi. Salah satu caranya



yaitu lewat penguatan kesadaran bela negara dan penanaman nilai-nilai Pancasila.

Mayjen TNI Ibnu Triwidodo juga menyebutkan, “Menilai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengingatkan kembali semangat Pancasila adalah hal penting untuk dilakukan. Solusinya, mau tidak mau kita harus bicara *character building* dan *nation building*. Kedua hal tersebut harus masuk baik ke dalam pendidikan formal maupun informal. Sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatakan 20 persen APBN itu masuk ke pendidikan. Sebagai contoh pada anak sekolah tingkat SD, aplikasinya dalam bentuk mata pelajaran budi pekerti,” ujar Mayjen TNI Ibnu Triwidodo.

Mayjen TNI Ibnu Triwidodo

Indonesia menghadapi berbagai ancaman baik fisik dan non-fisik. Ancaman non-fisik dirasa lebih besar dan mengancam ideologi negara yakni Pancasila

juga menambahkan, Indonesia harus melihat dan belajar dari beberapa negara di sekitar Indonesia. Contohnya Jepang, yang terkenal negara paling maju. Jepang tidak pernah melupakan tradisi nenek moyangnya. Mereka mampu menerima kemajuan teknologi, tetapi tidak pernah meninggalkan nilai-nilai luhurnya. “Sedangkan di Indonesia sendiri, akibat kurangnya proteksi terhadap nilai-nilai luhur, maka intervensi pengaruh budaya-budaya asing masuk ke tempat kita. Sedangkan kondisi negara kita negara kepulauan, maka untuk memfilter arus globalisasi, tidak semua mampu bertahan,” pungkas Mayjen TNI Ibnu Triwidodo menambahkan pemaparannya.

Sempat terjadi pergolakan ideologi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perlu diketahui bahwa menurut Herbert Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok, yakni Nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), Komunis (PKI), Sosialisme Demokrat (Partai Sosialis Indonesia/PSI), dan tradisional Jawa (Partai Indonesia Raya/PIR), kelompok teosofis/kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamongpraja. Pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

Di era globalisasi saat ini, masih menurut Mayjen TNI Ibnu

Triwidodo, Indonesia menghadapi berbagai ancaman baik fisik dan non-fisik. Ancaman non-fisik dirasa lebih besar dan mengancam ideologi negara yakni Pancasila. Hal itu akan berpengaruh pada keutuhan dan ketahanan nasional. Sebab, apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal ingin membatalkan apa yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Ancaman terhadap ideologi Pancasila terasa amat nyata. Seperti yang baru-baru saja terjadi, yakni keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menganut ideologi Khilafah Islamiyah. Paham tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah resmi membubarkan HTI karena dinilai melakukan pelanggaran atas Perppu Ormas dan melawan Pancasila. Sebelumnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas HTI. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Mayjen TNI Ibnu Triwidodo berharap agar Lemhannas sebagai lembaga pendidikan tertinggi non gelar di Indonesia, dalam menjalankan perannya yaitu mencetak kader-kader pimpinan nasional, diharapkan para pemimpin ini mampu menyamakan persepsi ideologinya, dan dengan kewenangan yang dimiliki, dapat menularkan hal tersebut.[AS]



Prof. Dr. Sudaryono, S.H
 Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosial
 Budaya Lemhannas RI

Pahit Getirnya Bangsa Indonesia Mencapai Cita-Cita Kemerdekaan



Berusahalah belajar sejarah, membaca atau merenungkan dari masa ke masa, jika tidak mau kehilangan jejak nilai-nilai kemerdekaan

Perjuangan untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajah telah dilakukan di berbagai daerah Nusantara jauh sebelum abad ke-20. Berdasarkan catatan sejarah, sedikitnya ada dua faktor yang mengakibatkan penduduk Nusantara dijajah oleh bangsa barat, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga bangsa lain dapat masuk

dan menguasai serta memonopoli perdagangan. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di negara-negara penjajah khususnya di Eropa sehingga mereka melakukan ekspedisi dan ekspansi ke seluruh dunia hingga sampai di wilayah Indonesia.

Selama masa penjajahan berlangsung, banyak hak-hak bangsa Indonesia yang dirampas oleh penjajah, di antaranya adalah hak-hak berserikat, dan berkumpul.

Selain itu berbagai kekejaman seperti penindasan, perbudakan, dan pemberangusan kebebasan berekspresi menimpa bangsa Indonesia yang dulu dikenal sebagai Hindia Belanda. Roda kehidupan masyarakat serba diawasi. Seperti yang digambarkan oleh salah seorang Tenaga Pengajar Lemhannas RI bidang Sosial Budaya, Prof. Dr. Sudaryono, SU, bahwa “Penjajah tidak menginginkan warga pribumi ini berkembang dan mengetahui bahwa mereka itu dieksploitasi. Selalu dalam pengawasan, apalagi terhadap orang-orang yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan,” ujar Prof. Sudaryono.

Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad, menimbulkan dampak yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, diantaranya mengakibatkan penderitaan psikis dan kesengsaraan fisik, adanya pengambilan hak penduduk di Indonesia secara paksa, hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta penduduk pada saat itu. Dampak terbesar yang dialami oleh bangsa Indonesia selama masa penjajahan yakni perampasan kekayaan sumber daya alam (SDA), terutama SDA yang berupa rempah-rempah serta munculnya kemerosotan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.

Salah satu strategi yang digunakan para penjajah yakni dengan adanya pembodohan, di mana pendidikan dihapuskan sehingga pemikiran rakyat Indonesia menjadi tertinggal dan tidak berkembang.

Merupakan awal tonggak kebangkitan bangsa yang telah sekian lamanya terbenam dalam penjajahan. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Sudaryono, perlawanan secara fisik yang tidak terkoordinir, mendorong pemimpin Indonesia untuk merubah perlawanan yaitu dengan menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. “Ada tokoh-tokoh lokal yang memberi kesadaran kepada

Jangan segan-segan menceritakan perjuangan kemerdekaan misalkan melalui visualisasi film dan tetap diteruskan agar lama kelamaan tidak akan hilang

rakyat Indonesia bahwa kita sedang dijajah, dan masa depan sangat ditentukan dengan kebebasan dan kemerdekaan. Begitu ada tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran itu, kemudian mempengaruhi lingkungannya, di situlah muncul perlawanan-perlawanan di berbagai tempat,” kata Prof. Sudaryono.

Kesadaran berbangsa diawali oleh berdirinya gerakan Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap. Budi Utomo di didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 yang dilatarbelakangi oleh propaganda dr. Wahidin Sudirohusodo untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pengajaran yang pada masa penjajahan kondisinya sangat terbelakang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.

Prof. Sudaryono menambahkan bahwa pada masa itu, perlawanan yang dilakukan memakan waktu yang sangat lama karena belum ada kemudahan dalam berkomunikasi. Sehingga penyebaran informasi masih sangat sulit dan terbatas. “Kemudian mereka menarik simpati orang lain, menggalang kekuatan untuk melawan penjajah. Pada saat itulah mulai muncul perlawanan-perlawanan, hingga terjadi perang di mana-mana,” jelas Prof. Sudaryono.

Beratnya penjajahan digambarkan

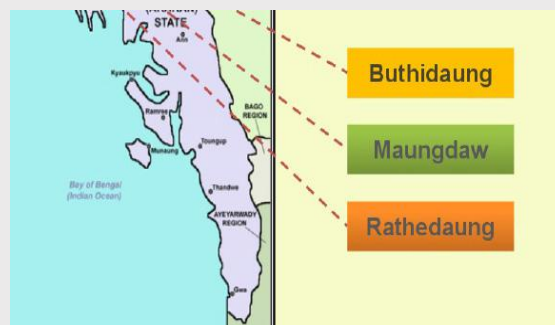
dari lamanya masa pergerakan yang dilakukan hingga menimbulkan banyaknya korban jiwa. Persoalnya berada pada pergerakan yang tidak menyatu (sporadic), di mana kekuatan terpisah-pisah, berada di pulau dan wilayah yang berbeda-beda, yakni di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya. Sedangkan penjajah asing memiliki pengetahuan, teknologi dan persenjataan yang lebih maju, serta mempunyai jaringan yang lebih kuat untuk meredam tokoh-tokoh lokal.

Masa penjajahan merupakan waktu-waktu yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia, harus merasakan pahit getirnya rakyat Indonesia dijadikan budak oleh bangsa asing. Banyak hal yang dapat dijadikan teladan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa sekarang. Salah satunya melalui pembelajaran sejarah yang memuat pewarisan nilai-nilai keteladanan. “Jika tidak mau berusaha maka akan kehilangan jejak nilai-nilai kemerdekaan. Caranya dengan belajar sejarah, membaca atau merenungkan dari masa ke masa. Contoh sederhana, jangan segan-segan menceritakan perjuangan kemerdekaan. Misalkan melalui visualisasi film harus tetap diteruskan kalau tidak lama kelamaan akan hilang,” ungkap Prof. Sudaryono.

Poin terpenting, seperti yang disampaikan oleh Prof. Sudaryono bahwa setiap orang hidup pada masanya. Apa yang dipikirkan, dilakukan, dan dirasakan adalah refleksi dari apa yang ada di sekitarnya. Namun yang menjadi kekhawatiran saat ini yakni generasi penerus bangsa lambat laun mulai melupakan sejarah perjuangan masa kelam bangsa Indonesia. “Celakanya yang terjadi pada anak-anak di zaman sekarang, mereka berpikir hidup dalam konteks sekarang, tidak memahami apa yang dilakukan oleh para perintis kemerdekaan,” ungkap Prof. Sudaryono. [AS/YA]



Perkembangan Krisis Kemanusiaan ROHINGYA



Lemhannas RI berkesempatan mengundang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Myanmar, Dr. Ito Sumardi DS, Drs., S.H., M.H., M.B.A., M.M. untuk memberikan kuliah umum kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI, Peserta PPSA XI dan PPRA LVI tahun 2017, Pengurus IKAL dan Pengurus Perista Lemhannas RI yang bertempat di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI pada Selasa (12/9) siang.

Kuliah umum diawali dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Dalam sambutannya Agus Widjojo mengatakan bahwa di Indonesia saat ini sedang marak berkembang isu krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, yakni mengenai etnis Rohingya yang sedang viral di media sosial. “Banyak hal-hal yang terkait dengan kemampuan teknis dari media sosial. Misalnya penyebaran *hoax*, serta gambar-gambar yang permasalahan sebenarnya sudah selesai kemudian dimunculkan kembali. Sehingga menimbulkan implikasi dan dampak kesempingan yang kurang menguntungkan. Untuk itu kuliah umum dari Dubes RI untuk Myanmar sangat diperlukan,” ujar Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

“Sebagai seorang Duta Besar, Ito Sumardi telah

melakukan tugasnya dengan sangat baik, bisa membuat Indonesia menjadi sangat dekat dengan lingkaran elit di Myanmar, memiliki hubungan kedekatan dengan Aung San Suu Kyi, Pemimpin National League for Democracy (Persatuan Nasional untuk Demokrasi atau NLD), dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia, dan membuka akses terhadap etnis Rohingya,” kata Gubernur Lemhannas RI. Di samping itu, Ito Sumardi juga mampu meyakinkan pemerintah Myanmar bahwa Indonesia bisa menjadi satu-satunya negara yang dapat dijadikan kawan untuk mencari penyelesaian terkait konflik di Rakhine.

Dalam sambutannya Agus Widjojo berharap dengan terselenggaranya kuliah umum ini peserta bisa memiliki latar belakang yang lebih seimbang tentang apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar dan tidak terjebak oleh berita-berita sensasional di media massa maupun di media sosial.

Kuliah umum dipimpin oleh seorang moderator, Laksda TNI Agung Pramono yang membuka sesi pemaparan materi. Dubes RI untuk Myanmar, Ito Sumardi menjelaskan tentang awal mula penyebab pecahnya krisis kemanusiaan di Rakhine. Bagi pemerintah Myanmar, etnis Rohingya di kampung Rakhine dianggap pendatang ilegal. Pemerintah Myanmar merasa risih dengan kehadiran etnis



Gubernur Lemhannas RI Menyerahkan Cenderamata kepada Dubes Indonesia untuk Myanmar

Rohingya karena mereka beragama Islam. Oleh sebab itu Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2017, terjadi penyerangan terkoordinasi terhadap 30 pos polisi dan tentara di wilayah Rakhine Utara hingga menimbulkan beberapa korban jiwa. Tiga wilayah yang menjadi sasaran penyerangan yakni Rathedaung, Maungdaw, dan Buthidaung. Diketahui pelaku berasal dari kelompok militan teroris yang dikenal dengan ARSA atau Arakan Rohingya Salvation Army. Kelompok teroris ini dipimpin oleh Abu Ammar, dan dianggotai oleh sebagian besar masyarakat dari etnis Rohingya.

Ditampilkan pula dalam kuliah umum, foto-foto para korban penyerangan, kerusakan tempat-tempat ibadah agama Budha, membakar rumah warga dan mobil-mobil polisi, serta membunuh penduduk Myanmar beragama Islam dan Hindu.

Peristiwa teror yang terjadi dilakukan oleh ekstrimis dalam waktu 48 jam setelah dikeluarkannya laporan akhir Komisi. Secara signifikan, kekerasan tersebut berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya, karena sudah menyerang pemukiman penduduk termasuk umat Muslim warga Myanmar. Serta secara serius telah mengancam prospek pemulihan perdamaian dan menghambat pembangunan.

Merespon kejadian tersebut, KBRI Yangon mengeluarkan pernyataan keprihatinan terkait dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah Rakhine Utara. Selain itu, memberikan dukungan atas langkah cepat dari Pemerintah Myanmar, dalam memulihkan keamanan sebagai upaya mewujudkan perdamaian di wilayah Rakhine State. KBRI Yangon juga memfasilitasi kunjungan Meteri Luar Negeri RI ke Myanmar untuk dapat menyampaikan pesan dari negara dan bangsa Indonesia kepada pemerintah Myanmar.

Menteri Luar Negeri RI meminta untuk diadakan pertemuan dengan Aung San Suu Kyi, dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. "Sangat sulit untuk mengkondisikan dalam waktu tiga hari karena Pemerintah Myanmar sedang dalam kondisi *pressure* yang luar biasa. Namun saya meyakinkan Menteri State Counsellor bahwa kedatangan Menlu RI setidaknya untuk meredam *pressure* yang terjadi di Indonesia," jelas Dubes Ito Sumardi.

Selanjutnya Dubes RI untuk Myanmar, Ito Sumardi menyampaikan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing bahwa hal inilah yang diharapkan pemerintah Myanmar, bagaimana belajar dari Indonesia menangani masalah-masalah gangguan keamanan secara profesional dan terukur. Terukur dalam arti kata menggunakan pendekatan



dalam koridor HAM.

Menanggapi masukan dari pihak KBRI Yangon, Jenderal Senior Min Aung Hlaing bersedia menerima masukan yang diberikan kepadanya. Seperti disampaikan oleh Dubes Ito Sumardi terhadap pernyataan Jenderal Senior Min Aung Hlaing didepan peserta kuliah umum, “Saya terima semua yang diusulkan, kecuali dua. Satu masalah *nationality*, bagaimana bisa kita menjamin orang-orang Rohingya yang dijadikan penduduk Myanmar tidak termasuk ke dalam kelompok militan bersenjata. Bukankah nanti mereka akan menyuburkan radikalisme dikalangan masyarakat Myanmar. Yang kedua, bagaimana bisa militer Myanmar tinggal diam, pada saat polisi dan TNI diserang.” terang Ito Sumardi, menggambarkan pernyataan Jenderal

Senior Min Aung Hlaing.

Duta Besar Ito Sumardi juga melaporkan situasi terakhir di wilayah Rakhine kepada para peserta kuliah umum. Kondisi terakhir sudah tidak terjadi lagi kontak senjata, karena ARSA melayangkan surat permintaan gencatan senjata selama satu bulan dari tanggal 10 september hingga tanggal 10 oktober 2017. Saat ini Aparat Keamanan Myanmar lebih memprioritaskan kegiatan dalam bentuk patroli dan penjagaan pemukiman warga Myanmar untuk akses bantuan kemanusiaan.

Sebagai perwakilan Diplomatik Indonesia dengan Myanmar, Kedubes RI berusaha menjaga hubungan baik dengan Myanmar, agar tidak terputus. “KBRI Yangon selama ini melaksanakan *non-megaphone diplomacy*, kita



tidak pernah berkoar-koar. Itu yang membuat pemerintah Myanmar *respect*. Kemudian kita mengirimkan bantuan dengan cara inklusif, diberikan kepada seluruh warga yang membutuhkan, tidak peduli dari agama apa, etnis apa, kelompok apa. Hal itu yang sangat dihormati,” ujar Ito Sumardi.

Pemerintah Indonesia sudah bersusah payah membuka jalur ke Myanmar, oleh sebab itu, Ito Sumardi berharap jangan sampai hanya karena pelemparan bom molotof, dan pembakaran bendera negara Myanmar oleh para demonstran di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta merusak hubungan baik dengan pemerintah Myanmar. Karena kejadian tersebut muncul reaksi keras beberapa pejabat dan masyarakat Myanmar.

Ito memberikan kesimpulan bahwa tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi saat ini merupakan respon pemerintah terhadap penyerangan yang dilakukan oleh kelompok ARSA, “Jelas bahwa peristiwa yang terjadi di Myanmar bukanlah permasalahan agama, melainkan masalah etnis. Peristiwa penyerangan kelompok bersenjata dari etnis Rohingya, kemudian pemerintah merespon yang tentunya ada konsekuensi dan saat ini sedang terjadi yakni tragedi kemanusiaan,” jelas Ito Sumardi menutup sesi materi pada kuliah umum.

Bantuan Telah Dikirimkan oleh Indonesia

Berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, bahwa Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/9) telah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi dari Rakhine State, Myanmar, yang saat ini berada di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Pengiriman bantuan yang diberangkatkan dari Halim Perdanakusuma merupakan pemberangkatan yang pertama dan akan disusul dengan bantuan-bantuan selanjutnya.

“Perlu saya sampaikan, ini adalah pemberangkatan yang pertama. Nanti *insya Allah* minggu depan akan diberangkatkan lagi yang kedua, ketiga, dan seterusnya,” ujar Presiden pada Rabu, 13 September 2017, saat melepas bantuan kemanusiaan di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Untuk diketahui, akhir tahun lalu, tepatnya pada 29 Desember 2016, pemerintah juga telah mengirimkan sebanyak 10 kontainer paket bantuan untuk warga Rakhine yang berada di Myanmar. Saat itu bantuan diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan menggunakan kapal dan disaksikan langsung oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Adapun kali ini, bantuan diberangkatkan dengan menggunakan empat pesawat Hercules agar paket bantuan dapat secepatnya diterima oleh para pengungsi yang berada di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Bantuan tersebut memang sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh para pengungsi di sana. Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa menanggapi antusiasme yang tinggi dari berbagai unsur masyarakat yang ingin memberikan bantuan, pemerintah akan membantu menampung dan menyalurkan bantuan tersebut. “Diplomasi kemanusiaan ini kita melakukan sinergi, karena ini (tahap pertama) memang bantuan dari pemerintah. Tapi kita dapat informasi banyak sekali keinginan banyak pihak ingin juga berikan sumbangan kontribusi bagi pengungsi itu akan kita tampung dan salurkan,” ujar Retno.[AS]

CDSS Australia dan Lemhannas RI Diskusikan Penanggulangan Terorisme



Diskusi CDSS Australia dan Lemhannas RI di ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo menyambut kedatangan delegasi *Centre for Defence and Strategic Studies* (CDSS) Australia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Simone Wilkie di Gedung Trigatara, Lemhannas RI pada Rabu (26/7). Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. III Lemhannas RI.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya menuturkan secara singkat sejarah mengenai Lemhannas RI yang dahulu merupakan Lembaga Pertahanan Nasional dan berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional, jelas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, merupakan respon Lemhannas RI terhadap berbagai ancaman terhadap

bangsa Indonesia. Selain itu, Agus Widjojo juga menjelaskan bahwa Lemhannas RI saat ini memiliki dua program pendidikan yaitu PPRA yang berlangsung selama tujuh bulan dan PPSA yang berlangsung selama empat bulan.

Terkait dengan topik diskusi yaitu penanggulangan terorisme, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyatakan bahwa penanggulangan terorisme adalah masalah yang membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi di dunia.

Menanggapi sambutan Gubernur Lemhannas RI, Mayor Jenderal Simone Wilkie mengatakan bahwa selama ini telah melakukan berbagai diskusi terbuka dengan Lemhannas RI. Oleh karena itu, Wilkie berharap ke depan, kerja sama dan MoU dengan Lemhannas RI dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi kedua institusi dalam mengatasi masalah yang sama yang

ada di dua negara.

Kerja sama ini, lanjut Wilkie, juga harus didasari dengan rasa percaya dan saling memahami agar tercipta rasa saling menghormati. “Kerja sama ini harus dibangun berdasarkan kepercayaan dan saling memahami karena dari rasa percaya tersebut akan menjadi rasa saling menghormati sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum dapat kita temukan solusinya,” pungkask Wilkie.

Dalam paparan pertama yang dipaparkan oleh Jane Ackland dari CDSS yang berjudul “Penahanan, Rehabilitasi, Reintegrasi Tahanan Terorisme: Pendekatan Australia terhadap Tantangan Internasional” menyatakan bahwa terorisme yang bersifat wilayah saat ini telah berubah menjadi terorisme global. Australia juga turut bergabung dalam upaya PBB dan Amerika Serikat

dalam mengatasi masalah tersebut.

Menurut Ackland, terorisme terbentuk karena adanya keterikatan spiritual dan sosial. Keterikatan tersebut kemudian berubah menjadi identitas perseorangan. Identitas tersebut kemudian diturunkan kepada generasi muda.

Dari sisi manajemen tahanan yang masih menjadi permasalahan global, Jane Ackland memaparkan dua metode yang terdapat di dua distrik di Australia yaitu New South Wales dan Victoria. Di New South Wales, penanganan terhadap tahanan terorisme dilakukan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut dimaksudkan untuk memulihkan karakter dan mental tahanan terorisme. Pandangan kepercayaan yang dianut para tahanan terorisme diubah menjadi lebih 'lunak' sehingga akan membawa perubahan pada sikap, karakter, serta identitas mereka.

Sementara di Victoria, metode yang digunakan adalah metode disintegrasi di mana pandangan kepercayaan para tahanan terorisme mereka 'dihilangkan' sehingga mereka tidak menyebarluaskan pandangan mereka kepada generasi muda.

Strategi Indonesia Menanggulangi Terorisme

Selanjutnya, perwakilan peserta PPRA LVI Lemhannas RI, Dwityo A. Soeranto menjadi pemapar kedua yang menyampaikan paparan berjudul "Strategi dalam Menanggulangi terorisme dan Radikalisme". Soeranto menyebutkan bahwa kemunculan terorisme di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan keterbukaan Indonesia yang juga akan menyebabkan ideologi anti Pancasila.

Gerakan radikalisme telah muncul sejak kemerdekaan Indonesia, yang ditandai dari munculnya gerakan DI/TII dan NII di Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Alasan utama dari gerakan Islam garis keras tersebut dilatarbelakangi oleh politik lokal dari ketidakpuasan politik dan keterpinggiran politik.

Secara kultural, masyarakat Indonesia yang terbuka, juga semakin mudah mencari, menerima, dan bertukar informasi, sehingga nilai-nilai yang selama ini dianggap mapan kemudian mengalami tantangan. Ideologi radikal dan pendukungnya memanfaatkan keterbukaan ini untuk menyebarkan pengaruh mereka dengan memanfaatkan teknologi maju dan kondisi yang 'cair' dalam masyarakat urban. Dwityo juga menjelaskan mengenai babak baru penanggulangan terorisme Indonesia. Saat ini, Indonesia memasuki babak baru penanggulangan terorisme, ketika ISIS berkembang pesat dan melancarkan aksi-aksi terorismenya. Di Indonesia, penyebaran ISIS cukup masif karena beberapa tokoh radikal yang berpengaruh telah menyatakan diri bergabung ke gerakan ini seperti Abu Bakar Baasyir, Oman Abdurrahman dan Santoso.

Penyebaran ISIS dilakukan, baik dengan cara gerilya maupun melalui media sosial, yaitu pemberian ceramah antar masjid-masjid kecil, perekrutan anggota-anggota muda (khususnya mereka yang hanya lulusan SMA atau tidak lulus kuliah), penyebaran di Lapas (khususnya kepada terpidana kasus terorisme), dan pemasangan bendera ISIS di beberapa jalan di wilayah perkotaan. "Untuk memperkuat ajakan bergabung dengan ISIS, organisasi tersebut menggunakan testimoni dari warga Indonesia yang sudah berangkat dan bertempur di Suriah," kata Dwityo A. Soeranto

menjelaskan. Selain itu, ISIS juga pandai memanfaatkan media internet sebagai media propaganda. ISIS memanfaatkan sosial media karena mengetahui bahwa penduduk Indonesia salah satu dari 10 konsumen terbesar sosial media di dunia.

Dalam menanggulangi terorisme yang berkembang di Indonesia, Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan oleh Dwityo, menyampaikan beberapa kebijakan dalam forum G20 yang lalu yaitu mengawasi pendanaan bagi kelompok terorisme, membangun komunikasi strategis dalam menghadapi propaganda terorisme, menjadi kekuatan pendukung dalam mengatasi terorisme, membangun kerja sama dalam pertukaran intelijen, dan juga menekankan pentingnya deradikalisasi.

Sementara Indonesia, lanjut Dwityo, memiliki dua strategi dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme yaitu Hard dan Soft Strategy yaitu Penyusunan Undang-Undang dalam penanggulangan terorisme, memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Terorisme, Strategi Deradikalisasi, Strategi Penanggulangan Radikalisasi, dan Kerja Sama Internasional.

Sebelum menutup paparannya, Dwityo mengatakan bahwa terorisme adalah tindakan yang memiliki jaringan yang berakar dan rumit di mana tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum. Selain itu, keikutsertaan berbagai pihak terkait seperti institusi pendidikan, keluarga, lingkungan sosial serta generasi muda dalam pemberantasan terorisme menjadi bagian yang penting. Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih mendalam dan ditutup dengan foto bersama. [NM/AS/EH]

Delegasi National Defence College (NDC) India melakukan kunjungan ke Lemhannas RI (28/8). Kunjungan tersebut diawali dengan *courtesy call* antara Ketua Rombongan NDC, Shri Abhay Tripathi dengan Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo di Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan tenaga ahli dan pejabat Lemhannas RI. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional Lemhannas RI, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P dan menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum.

Dalam sambutannya, Ketua Rombongan NDC Shri Abhay menyebutkan bahwa NDC India tiap tahunnya rutin mengunjungi Lemhannas RI sebagai bagian untuk memperluas wawasan bagi peserta NDC India. "Diskusi yang dilakukan dengan pihak Lemhannas RI tidak hanya memperluas pengetahuan kami mengenai masalah keamanan, pertahanan, dan keamanan kawasan, akan tetapi juga meningkatnya kesepahaman dan tali kerjasama antar Indonesia dan India di masa depan," kata Shri Abhay membuka diskusi dengan para Tenaga Ahli Lemhannas RI di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. 3, Lemhannas RI.

"Saya tentu saja menyambut baik dalam kunjungan singkat kami ke Lemhannas RI. Hal ini disebabkan pengetahuan dan pengalaman komprehensif yang dimiliki oleh para ahli dan peserta pendidikan di Lemhannas RI," kata Shri Abhay melanjutkan.

Di India sendiri sedang menghadapi beberapa tantangan keamanan



(Kiri ke kanan) Delegasi National Defence College (NDC) India Sri Abhay, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, Laksda TNI Agung Pramono

Kunjungan National Defence College (NDC) India ke Lemhannas RI

internal, antara lain lintas batas terorisme di Jammu dan Kashmir, Pemberontakan di negara-negara Timur Utara, ekstrem sayap kiri atau yang sering dikenal dengan *Left Wing Extremism (LWE)* di negara bagian tertentu. Sementara LWE adalah gerakan pribumi, terorisme di Jammu dan Kashmir benar-benar disponsori oleh negara bagian dalam di Pakistan, serta keterkaitan eksternal dengan pemberontakan di negara bagian timur laut.

Shri Abhay menjelaskan pula dinamika politik dan militer China serta Pakistan yang ditujukan kepada India. Sampai saat ini, pemerintah India sudah berupaya melakukan inisiatif perdamaian dengan Pakistan, namun tidak membuahkan hasil yang baik. Seperti yang terjadi di tahun 1999, pada saat Perdana Menteri Vajpayee melakukan perjalanan bus ke Lahore, namun Pakistan malah menanggapi dengan Perang Kargil. Serta di tahun 2001, ketika Jenderal Musharraf mengundang KTT Agra, namun gagal karena sikap kaku yang ditunjukkan Pakistan di Kashmir, hal tersebut berkaitan dengan serangan Parlemen pada Desember 2001.

Diskusi kemudian dilanjutkan

dengan paparan dari Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI, Laksda TNI Agung Pramono mengenai "Keamanan Nasional Indonesia" yang membahas kepentingan nasional Indonesia, postur keamanan, tujuan, konsep perencanaan kapabilitas keamanan Indonesia, doktrin Presiden Joko Widodo mengenai Kebijakan Poros Maritim Dunia, dan isu keamanan seperti konflik Laut China Selatan, ASEAN dan keamanan kawasan, terorisme, serta *illegal fishing*.

Dalam kesempatan tersebut Laksda TNI Agung Pramono menyebutkan bahwa keamanan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Diskusi kemudian diakhiri dengan tukar-menukar cinderamata antar kedua institusi.[NMV]

Laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) PPRA LVI Lemhannas RI

Pada 29 dan 30 Agustus 2017 lalu, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LVI menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) dari Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, Tiongkok, dan Vietnam.

Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) merupakan program kegiatan rutin bagi para peserta PPRA Lemhannas RI untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam membuat kebijakan kedepannya.

Bagi para peserta, kunjungan SSLN memberikan manfaat antara lain para peserta dalam melihat secara langsung aktivitas obyek strategis yang dikunjungi dan diperoleh informasi akurat. Informasi tersebut di kemudian hari dapat digunakan sebagai bahan kajian strategis tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan mengenai negara yang bersangkutan. Peserta juga mendapat pengalaman yang lebih luas dan mendalam tentang penyelenggaraan pembangunan di negara tujuan sehingga dapat meningkatkan wawasan

para peserta, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan seminar di akhir pendidikan.

Tujuan dari kegiatan SSLN tersebut adalah bagaimana meningkatkan prospek hubungan RI dengan negara Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, Tiongkok, dan Vietnam dalam perspektif pembangunan nasional. Tempat yang dikunjungi oleh PPRA LVI Lemhannas RI adalah KBRI, instansi pemerintahan, pusat turisme, dan beberapa industri strategis di Korea Selatan. Dalam kunjungan ke negara-negara tersebut, para peserta mendapatkan gambaran mengenai negara yang mereka kunjungi dalam perspektif Astagatra, sejarah pembangunan negara, serta prospek hubungan bilateral.

Selain itu, kegiatan SSLN memberikan manfaat kepada para peserta karena dapat mendengar

secara langsung penjelasan dari pejabat instansi atau obyek-obyek yang dikunjungi, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan tentang perkembangan geopolitik maupun geostrategi dari negara yang dikunjungi. Di samping itu, peserta dapat memperoleh masukan dan pengalaman secara luas dan mendalam tentang penyelenggaraan pembangunan nasional negara-negara yang dikunjungi guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta yang kelak akan berguna dalam penugasan selanjutnya sebagai kader-kader pimpinan tingkat nasional. Selain itu, peserta juga memperoleh masukan dan wawasan yang lebih luas tentang lingkungan strategis (global) guna penyusunan taskap masing-masing serta penyelenggaraan seminar akhir pendidikan.



Peserta SSLN dengan negara tujuan Korsel menyampaikan laporan kegiatan

Korea Selatan

Pada 30 Agustus 2017, peserta PPRA LVI menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Korea Selatan. Kegiatan SSLN tersebut diikuti oleh 26 orang peserta PPRA yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Laksda TNI Ir. Yuhastihar dan didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Kewaspadaan Nasional Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib.

Dalam paparan disampaikan mengenai sejarah Korea Selatan di mana kawasan tersebut merupakan wilayah perebutan konflik antara kekuatan Barat dan Timur. Akan tetapi dalam perkembangannya, negara tersebut berhasil keluar dari krisis ekonomi karena kekuatan mental dan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga didukung oleh Jepang dan Amerika Serikat baik dalam aspek pertumbuhan teknologi, pengembangan SDM, maupun dukungan finansial.

Pada 2017 ini, hubungan Indonesia dan Korea Selatan menginjak umur 44 tahun. Permasalahan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan adalah masih lemahnya *law enforcement*, minimnya dukungan infrastruktur, kurangnya informasi, dan masih lemahnya kedua pemerintah dalam menginisiasi kerjasama antar dua negara.

Dalam aspek geografi, Korea Selatan memiliki luas wilayah 100.460 km persegi atau 45 persen dari semenanjung Korea, terdiri dari 3.200 buah pulau besar dan kecil, memiliki batas timur laut Asia, sebelah utara berbatasan dengan Rusia dan Tiongkok, serta bagian selatan berbatasan dengan Jepang. Secara demografi, penduduk berjumlah 51.3 juta orang dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0.3 persen per tahun, dengan indeks pembangunan manusia memiliki urutan ke-12 dari 182 negara, dengan Indeks Daya Saing menduduki peringkat ke-25 dari 148 negara. Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan pula mengenai Sumber Kekayaan Alam Korea Selatan yang bertumpu pada sektor pertanian dan manufaktur. Secara ideologi, Korea Selatan menggunakan *democratic liberalism*. Dalam aspek politik dalam negeri, Korea Selatan menggunakan sistem pemerintahan *Free Democracy*,

sementara dalam aspek politik luar negeri Korea Selatan menggunakan prinsip “Moon Jae In” yaitu berperan dalam mewujudkan “Global Korea”. Dalam aspek ekonomi, Korea Selatan bertumpu pada sektor industri dan infrastruktur yang berbasis ekspor. Dalam aspek sosial budaya, Korea Selatan menjadikan budaya kerja keras, tingginya pendidikan dan kualitas SDM, dan kepemimpinan yang baik untuk meningkatkan daya saing negara tersebut, serta dalam aspek pertahanan keamanan, Korea Selatan membangun kekuatan militer yang berorientasi pada teknologi dan siber.

Permasalahan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan adalah masih lemahnya *law enforcement*, minimnya dukungan infrastruktur, kurangnya informasi, dan masih lemahnya kedua pemerintah dalam menginisiasi kerjasama antar dua negara.

Malaysia



Peserta SSLN negara tujuan Malaysia saat mengunjungi Kementerian Pertahanan Malaysia

Para peserta PPRA LVI memaparkan kegiatan SSLN tujuan Malaysia terkait dengan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia yang dibangun berlandaskan politik bebas-aktif. Kerja sama dalam aspek pertahanan dan keamanan berorientasi peningkatan kesejahteraan dan keamanan agar selaras dengan konsepsi ketahanan nasional. Aspek pertahanan dan keamanan tidak mengarah pada pakta pertahanan atau perjanjian

pertahanan.

Berbicara mengenai sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia, seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, “Pembentukan Malaysia oleh Inggris dianggap membangun neokolonialis untuk mengepung Indonesia.” Pada tahun 1965, Indonesia keluar dari PBB karena Malaysia menjadi anggota tidak tetap DKPBB. Berbagai permasalahan yang terjadi menjadi dinamika hubungan

antara Indonesia dan Malaysia dari masa ke masa, seperti permasalahan Blok Ambalat yang pada tahun 1967, di mana Malaysia membuat batas sepihak yakni Landasan Kontinen dengan memasukan Blok Ambalat di wilayahnya, serta pindahnya patok perbatasan. Untuk itu, kegiatan SSLN ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan demi kepentingan nasional dan tuntutan nasional.

Dilihat dari aspek geografi, luas wilayah Malaysia 329 ribu km persegi, memiliki kesamaan iklim dan kemiripan kekayaan hayati dengan Indonesia. Dalam hal demografi, per tahun 2015 jumlah penduduk Malaysia mencapai 29 juta jiwa, dengan 12 persen jumlah penduduk merupakan keturunan Indonesia. Pada kesempatan kunjungan, para peserta juga diberikan pemaparan seputar kondisi sumber kekayaan alam, yang mengunggulkan hasil tambang seperti timah, bauksit, minyak bumi dan gas alam, serta dari sektor pertanian.

Dalam aspek ideologi, Malaysia berpegang pada Rukun Negara, dibentuk pada 31 Agustus 1970 oleh Dewan Gerakan Negara. Dari segi politik, Malaysia membagi ke dalam 14 Negara yakni, tujuh kesultanan, dua kerajaan, empat negara bagian, dan satu kewilayahan. Dari sektor ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat Malaysia terbilang cukup sejahtera yakni RM 30.070, dengan jumlah tenaga kerja yang meningkat rata-rata 230 tenaga kerja, atau 3,1 persen per tahunnya, dengan tingkat pengangguran 3,1 persen di tahun 2016. Mengenai aspek sosial budaya, terdapat banyak kemiripan antara Indonesia dan Malaysia, antara lain suku bangsa melayu yang kurang lebih 60 persen merupakan keturunan Indonesia, kemiripan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia, serta mayoritas penduduk beragama Islam. Malaysia sendiri memiliki strategi pertahanan nasional, yakni menangkal masalah

dari luar, melindungi di area perbatasan dan ASEAN, serta mobilisasi total seluruh sumber daya manusia dan sumber daya nasional lainnya.

Dalam menjalin kerjasama, Indonesia dan Malaysia menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih bermasalahnya sepuluh titik perbatasan, nasib buruh migran Indonesia, pengakuan (*claims*) atas warisan budaya, masalah *illegal logging*, serta masalah asap kebakaran hutan. Permasalahan terkait harus diselesaikan dengan diplomasi dalam memelihara hubungan kedua negara. Sebagai negara bertetangga langsung (*close neighbour*), prospek hubungan Indonesia dan Malaysia ke depannya akan saling menguntungkan dan membutuhkan (*mutual bilateral relationship*).

Myanmar



Kunjungan Peserta PPRALVI ke Myanmar

Kegiatan SSLN PPRALVI Lemhannas RI juga dilakukan di negara Myanmar, dengan pimpinan rombongan Prof. Prof. Dr. H. Didin S. Damanhuri, S.E. M.S. D.E.A., didampingi oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI, Marsda TNI Supriharsanto, bersama dengan Liaison Officer, Laksma TNI Erman Syafril, S.H., M.M. Sebanyak 27

Berbagai permasalahan yang terjadi menjadi dinamika hubungan antara Indonesia dan Malaysia dari masa ke masa, seperti permasalahan Blok Ambalat yang pada tahun 1967, di mana Malaysia membuat batas sepihak yakni Landasan Kontinen dengan memasukan Blok Ambalat di wilayahnya, serta pindahnya patok perbatasan.

orang peserta mengikuti kegiatan SSLN yang berlangsung selama lima hari dengan mengunjungi beberapa tempat Kedutaan Besar RI, Kementerian Pertahanan Myanmar, National Defence College of Myanmar, Kementerian Dalam Negeri Myanmar, Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kementerian Pendidikan dan Teknologi Myanmar, dan Kementerian Industri Myanmar.

Selain itu, para peserta juga melakukan peninjauan di dua tempat yakni kunjungan ke Japfa Comfeed dan obyek wisata budaya Shwedagon Pagoda.

Pada saat melakukan kunjungan ke Myanmar, para peserta mendapatkan penjelasan secara komprehensif tentang situasi Myanmar dari instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka pembangunan nasionalnya ditinjau dari aspek geopolitik dan geostrategik yang sangat berpengaruh terhadap hubungan pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Myanmar.

Hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar terus berkembang semakin baik, melalui *joint commissions meetings*, kedua negara menyepakati kebijakan kunci. Selain itu, banyak pejabat dan tokoh Indonesia yang diundang ke Myanmar untuk memberikan masukan.

Dalam aspek geografi, negara yang memiliki nama resmi Republik Persatuan Myanmar ini merupakan negara paling utara di Asia Tenggara, dengan luas wilayah 67 ribu km persegi. Perbatasan sebelah timur Myanmar berbatasan dengan Thailand dan Laos, sebelah utara berbatasan dengan RRT, serta sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh dan India. Jumlah penduduk mencapai 54 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,82 persen. Dalam sektor sumber kekayaan alam, Myanmar memiliki potensi unggulan pertambangan minyak dan gas, serta batu mulia seperti mineral batu ruby, safir, giok dan lain-lain. Negara ini menganut falsafah negara "*Three Main National Causes*". Myanmar menjadi eksportir beras terbesar ke-6 di dunia. Negara tersebut juga mengandalkan sektor pertanian dengan kontribusi 45 persen dari GDP yakni sebesar USD 50,2 milyar. Mengembangkan di sektor peternakan untuk ekonomi pedesaan, sektor perikanan, dengan

garis pantai 3 ribu km dengan hasil satu juta ton. Kekuatan angkatan bersenjata Myanmar disebut Tatmadaw, serta Myanmar *Police Force* yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Tiongkok



Peserta kegiatan SSLN PPRA LVI dengan negara tujuan Tiongkok menyampaikan laporan kegiatan

Tiongkok juga menjadi salah satu negara tujuan kegiatan SSLN PPRA LVI Lemhannas RI. Para peserta memberikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan dan evaluasi agar pelaksanaan SSLN selanjutnya menjadi lebih optimal. Beberapa lokasi kunjungan yang diagendakan antara lain di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing dan Kementerian Transportasi Tiongkok. Tidak hanya berkunjung ke lokasi pemerintahan saja, peserta juga mendatangi beberapa lokasi industri strategis seperti, Industri Transportasi Kereta Api Cepat, dan *China Railways Corporation (CRC)*.

Dalam pelaksanaan kegiatan sempat dijumpai beberapa hambatan seperti alokasi waktu yang singkat serta kesibukan pejabat Tiongkok terkait kegiatan. Selain itu, yang menjadi kendala cukup besar yakni mengenai bahasa komunikasi yang bisa dipahami oleh kedua pihak.

Para peserta berharap agar pelaksanaan kegiatan SSLN ke depan agar prioritas sasaran unggulan perlu ditentukan terhadap setiap negara tujuan, sehingga potensi positif dari negara tujuan bisa tergali lebih mendalam.

Kegiatan SSLN memberikan manfaat kepada para peserta karena dapat mendengar secara langsung penjelasan dari pejabat instansi atau obyek-obyek yang dikunjungi, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan tentang perkembangan geopolitik maupun geostrategi dari negara yang dikunjungi.

Vietnam



Peserta SSLN negara tujuan Vietnam

Kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Vietnam yang diikuti oleh perwakilan peserta PPRA LVI Lemhannas RI berjumlah 28 orang, dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 25 Agustus 2017 lalu. Kegiatan dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum & HAM Lemhannas RI, Irjen Pol. Drs. Achmad Syukrani, S.H., M.Hum., didampingi Tenaga Ahli Pengajar Bidang Politik dan Kewarganegaraan Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr., dan Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Ideologi Lemhannas RI, Marsma TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si.

Maksud kegiatan SSLN tersebut untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan SSLN PPRA LVI Lemhannas RI tahun 2017 di Negara Republik Sosialis Vietnam. Kegiatan SSLN juga bertujuan un-

tuk memberikan masukan kepada pimpinan Lemhannas RI dalam merumuskan kebijakan serta upaya penyempurnaan pelaksanaan SSLN di masa yang akan datang. Lokasi yang dikunjungi oleh peserta PPRA LVI antara lain, Akademi Pertahanan Nasional Vietnam, Institut Strategi Pertahanan Vietnam, Akademi Diplomati Vietnam, Kementerian Dalam Negeri Vietnam, dan beberapa industri strategis di Vietnam.

Hubungan Indonesia dan Vietnam dimulai sejak tahun 1940 setelah Indonesia merdeka, sedangkan hubungan bilateral semenjak tanggal 30 Desember 1955, namun sempat terputus di tahun 1965 pada masa G 30 S/PKI, dan mulai terjalin kembali ditahun 1973. Berdasarkan aspek geografi, Vietnam memiliki luas wilayah 332.559 km persegi yang terdiri dari 59 provinsi, berbatasan

dengan RRT, Laos, Kamboja, LCS, dan Indonesia (Natuna). Daratan Vietnam terdiri dari 73 persen pegunungan & perbukitan serta 24 persen daerah pertanian. Sedangkan menurut aspek demografi, Vietnam memiliki mayoritas penduduk asli Vietnam dengan jumlah 93.4 juta jiwa, kepadatan penduduk tidak merata terutama di wilayah perkotaan, dan sebagian penduduknya masih nomaden atau berpindah-pindah.

Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang dimiliki dibagi menjadi dua yakni SKA Hayati yang terdiri dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta SKA Non Hayati, yakni besi, timah, perak, perunggu, logam putih, emas, dan hasil tambang lainnya. Secara ideologi, Vietnam menganut Ideologi Sosialis dan Ekonomi Liberal, paham tersebut masih memiliki persepsi negatif di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam aspek politik, semua organ pemerintahan dikontrol oleh partai tunggal yaitu Partai Komunis Vietnam (VCP). Dalam hal ekonomi, pemerintah menyusun strategi sector elektronik, dan pertanian, iklim investasi dan bisnis. Serta menjalin kerjasama di bidang investasi, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi, dan energi. Dalam bidang sosial budaya, Vietnam dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yakni mencintai budaya sendiri dengan menerapkan karakter pantang menyerah, gigih dan keras, serta dalam aspek pertahanan keamanan tentara Vietnam merupakan kekuatan berpengaruh kedua setelah Partai Komunis Vietnam. [AS/EH]



Kunjungan ke tempat wisata Museum Nasional Korea Selatan



PORTAL INFORMASI DAN BERITA LEMHANNAS RI



LEMBAGA
KETAHANAN
NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA

lemhannas.go.id

Menko Maritim:

Potensi Laut Indonesia Baru Tereksplorasi 8%

Ceramah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI di hadapan peserta PPSA XXI dan PPRA LVI di Lemhannas RI

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dan garis pantai sepanjang 99.093 km², tidak mengherankan jika potensi kelautan Indonesia mencapai hampir US\$ 1,3 triliun per tahun. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI dalam ceramahnya di hadapan para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI dan Program Pendidikan Reguler (PPRA) LVI di Lemhannas RI, Senin (11/9).

“Dari hasil survey kita, potensi laut yang baru bisa kita eksplorasi mungkin baru 8%”, ungkap Luhut.

Kondisi ini mencerminkan bidang kelautan kita masih belum memanfaatkan secara optimal. “Selama bertahun-tahun dari zamannya Belanda, kita tidak punya ini kebijakan kelautan yang jadi dokumen resmi pemerintah”, jelas Luhut. Akibatnya pembangunan sektor kelautan tidak menjadi prioritas. Persoalan lainnya adalah inefisiensi pelaksanaan pembangunan. “Inefisiensi itu menjadi masalah besar yang harus kita perbaiki sekarang ini”, ujar Luhut.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan kemaritiman dan mengatasi inefisiensi, menurut Luhut, kini pemerintah telah membuat kebijakan kemaritiman yang dipayungi dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan berfokus untuk melakukan pemerataan pembangunan terutama di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Luhut berujar, “Presiden ingin pemerataan pembangunan. Di Morowali misalnya, sekarang sudah masuk investasi mulai dari listrik, smelter, sampai pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya.

Itu pertumbuhan ekonominya 56%, sehingga pertumbuhan Sulawesi di atas 7%.”

Pemerintah juga sedang menggenjot pembangunan berbagai infrastruktur yang mendukung konektivitas antar pulau dan penurunan biaya logistik di antaranya dengan membangun *Light Rapid Transportation* (LRT) yang rencananya akan dibangun di beberapa kota besar, tol laut dengan 7 pelabuhan utama yang terkoneksi, penguatan pelabuhan seperti Kuala Tanjung sebagai hub di wilayah Barat dan pelabuhan Makasar di wilayah Timur serta pembangunan pelabuhan baru seperti di Patimban.

Jor-joran pembangunan infrastruktur ini tentu membutuhkan banyak biaya. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur ini, pemerintah berupaya menarik investor. “Supaya dari APBN yang 20% saja meng-cover infrastruktur, lainnya sekarang bisa dari *private sector* yang masuk,” jelas Luhut.

“Caranya dengan bisnis modelnya dibuat menarik seperti bisnis model LRT yang menarik”, lanjutnya. Setelah dikalkulasi oleh Kemenko Maritim, pembiayaan LRT yang menggunakan APBN tidak akan efisien. Seperti LRT Jakarta yang membutuhkan Rp 27-28 triliun, jika menggunakan pembiayaan APBN multiyears akan membengkak menjadi Rp 40 triliun. Akhirnya dicari jalan keluar yang salah satunya dengan menarik pemodal atau investor untuk membiayai proyek ini. Dengan bisnis model yang jelas dan garansi yang terjamin, sektor swasta mau bekerja sama dengan pemerintah.

Dalam ceramahnya, Luhut menyatakan pembangunan besar-besaran yang sekarang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia negara maritim



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Panjaitan

yang berdaulat, maju, kuat, mandiri, memberikan kontribusi yang jelas untuk kepentingan bangsa kita.

Menuju Swasembada Garam

Kurang maksimalnya pemanfaatan potensi kelautan terlihat juga pada persoalan garam nasional yang beberapa kurun terakhir ini menjadi sorotan. Persoalan garam ini tak luput dari pembahasan dalam ceramah Luhut di Lemhannas, Senin (11/9).

Setelah kelangkaan garam terjadi, pemerintah berupaya kembali menata sistem pergaraman nasional dengan menyeimbangkan *demand* dan *supply* garam nasional. Menurut Kemenko Maritim, inilah sebab utama kelangkaan garam yang terjadi beberapa waktu lalu. Tingkat konsumsi garam, baik garam konsumsi maupun garam industri tinggi, tetapi persediaan garam lokal belum mampu mencukupi kebutuhan garam nasional.

Minimnya produksi garam nasional menurut Kemenko Maritim disebabkan oleh kurangnya pabrik garam industri domestik, rendahnya kualitas garam bahan baku industri, dan regulasi yang tidak mendukung stabilitas harga garam.

Untuk mewujudkan swasembada garam, Kemenko Maritim membuat sejumlah rekomendasi yang bersifat jangka pendek dan panjang di antaranya dengan meningkatkan kualitas garam rakyat dengan mengintegrasikan lahan rakyat, membuat pabrik garam industri, dan penyerapan garam rakyat. [NM]

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dipl.Apling, MA memaparkan materi



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dipl. Apling, MA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dipl.Apling, MA membawakan materi mengenai “Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional” kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI di Ruang Bhinneka Gedung Pancagatra Lemhannas RI pada Selasa (22/08).

Acara ini dibuka dengan perkenalan Prof. Yohana Susana Yembise, yang merupakan menteri sekaligus guru besar pertama dari Tanah Papua sepanjang sejarah RI. Selanjutnya Prof. Yohana menjelaskan mengenai tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yaitu berkomitmen kuat dalam pembangunan sumber daya manusia terutama wanita yang berkualitas guna menyongsong *Gender Equality*

Planet 50:50 pada tahun 2030. *Gender Equality Planet 50:50* adalah sebuah kampanye yang dicetuskan oleh PBB yang mempunyai visi dan misi untuk menyetarakan perempuan mendapatkan hak yang sama dengan lelaki dalam semua aspek kehidupan, tanpa mengurangi norma dan kodrat sebagai perempuan.

Selanjutnya Menteri Yohana membahas mengenai mengapa perempuan dan anak sangat penting bagi suatu bangsa. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi berkumpul bersama seluruh kepala negara di dunia untuk membahas mengenai kesetaraan gender. Dari 17 indikator, perempuan menjadi perhatian dunia saat ini. Indonesia ditunjuk sebagai sepuluh negara besar untuk bisa mencapai *Gender Equality Planet 50:50* pada tahun 2030, karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar serta memiliki toleransi yang tinggi dan wanita Indonesia saat ini sudah maju. Menteri Yohana mengatakan,



“Hampir di seluruh dunia perempuan masih dinomorduakan dan masih menjadi korban dalam berbagai bentuk tindakan pelanggaran, negara belum bisa disebut maju, tidak akan bisa bebas dari kemiskinan bila perempuan belum ada di garis aman, ini menjadi satu tugas utama kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, untuk mempersiapkan perempuan dalam menyukseskan komitmen global.

Menteri Yohana selanjutnya memaparkan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih menduduki ranking 113 dari 188 dari negara di dunia, selanjutnya Indeks Pembangunan Global (IPG) masih cukup menantang karena menduduki ranking 108 dari 187, dan yang terakhir adalah Indeks Ketidakadilan Gender di Indonesia berada pada ranking 103 dari 187 negara di dunia. Permasalahan yang dihadapi wanita Indonesia saat ini

masih sangat banyak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan keluarga, kekerasan seksual, dan juga kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sangat intensif untuk datang ke daerah-daerah dan memberikan materi kepada kepala-kepala daerah untuk mengingatkan bahwa bagaimana pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena mereka belum menyadari bahwa perempuan dan anak adalah pilar yang sangat penting bagi suatu bangsa.

Solusi selanjutnya yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak adalah membuat Program yang disebut *Three End Politik*, Program ini berfokus pada masalah-masalah yang terjadi di Indonesia seperti menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang banyak terjadi di Indonesia, menyelesaikan perdagangan perem-

puan di mana lima daerah besar Indonesia masih memiliki angka yang tinggi dalam perdagangan manusia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara barat, selanjutnya adalah menyelesaikan ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan, dan yang terakhir adalah bagaimana upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di akhir ceramahnya mengatakan, “Saat ini dunia berubah, ekonomi juga ikut berubah, oleh karena itu kita harus bisa untuk mandiri, membangun keluarga yang mandiri karena perempuan di Indonesia sudah cukup maju dan kita harus bangga mempunyai perempuan-perempuan hebat di bangsa ini”. [EH]

PPSA XXI Jalin Kerjasama dengan Media terkait Publikasi Seminar Nasional

Perwakilan Peserta PPSA XXI melakukan kunjungan ke beberapa media yaitu CNN Indonesia, Kompas, dan Metro TV pada Rabu (6/9). Kunjungan yang dipimpin oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi yang juga merupakan salah satu peserta PPSA XXI ini bertujuan untuk melakukan kerja sama dengan media. Kerja sama tersebut berkaitan dengan publikasi seminar nasional yang akan diselenggarakan oleh peserta PPSA XXI di akhir proses pendidikan. Seminar nasional yang mengangkat tema “Peran Pancasila dalam Memperkokoh NKRI” secara spesifik akan membahas mengenai aktualisasi Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Tema yang terpilih untuk seminar nasional tersebut berangkat dari kurangnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh tim pelaksana seminar. Untuk itu, seminar ini bertujuan agar masyarakat memahami serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pendukung terlaksananya seminar nasional, kegiatan ini diawali dengan diskusi dan RTD (Round Table Discussion) sebanyak dua kali. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai aktualisasi nilai-nilai pancasila bagi seluruh masyarakat



Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi memberikan cinderamata untuk KOMPAS TV

Indonesia yang akan menjadi pembahasan utama pada saat seminar.

Maka dari itu, media diharapkan dapat membantu mensosialisasikan seminar nasional tersebut dalam bentuk peliputan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa.

Menanggapi hal tersebut, pihak media menyetujui permintaan kerja sama dalam bentuk peliputan kegiatan seminar nasional tersebut. Budiman, selaku perwakilan dari Kompas menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan berupa publikasi ke dalam beberapa platform media yang dimiliki oleh Kompas. Hal tersebut bertujuan agar

pembahasan dalam seminar nasional dapat tersosialisasikan dengan cepat. Selain itu, Budiman juga memberi masukan agar seminar nasional ini memiliki daya tarik bagi generasi muda. Sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan memiliki peran untuk negara, dirasa perlu untuk mengetahui wawasan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Dalam kegiatan kunjungan media ini, para Peserta PPSA XXI tidak hanya menjalin kerjasama dan berdiskusi mengenai seminar nasional yang akan diselenggarakan pada 16 November 2017 mendatang. Kegiatan lain yang dilakukan adalah mengunjung dapur redaksi media untuk mengetahui bagaimana proses produksi berita.[FR]

Olah Sismennas XLV, Koordinasi Lintas Sektoral dalam Menyikapi Dinamika Sosial



Peserta PPRA LVI melaksanakan praktik Olah Sismennas XLV yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI

Lemhannas RI menyelenggarakan Olah Sismennas (Sistem Manajemen Nasional) yang merupakan bagian dari pendidikan bagi para peserta PPRA berupa latihan atau praktik mekanisme pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan strategi dan upaya ditingkat nasional sesuai sistem manajemen nasional sebagai aparatur negara pada Selasa (5/9). Pembukaan acara ini diselenggarakan di Ruang Dwiwarna, Gedung Pancagatra Lantai III, Lemhannas RI.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh para peserta PPRA LVI ini berlangsung selama empat hari yaitu pada tanggal 5 - 8 September 2017. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih peserta PPRA LVI agar mampu bekerjasama dalam kelompok atau tim sebagai aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, Olah Sismennas juga bertujuan memberikan pengarahan dan pelatihan kepada peserta dalam kapasitasnya sebagai aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Plt. Deputi Pendidikan Pimpinan

Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Karsiyanto dalam membacakan sambutan Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa tema “Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Terkait dalam rangka Menyikapi Dinamika Sosial Budaya Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional” yang diangkat dalam Olah Sismennas XLV kali ini dinilai tepat.

“Tema ini tepat dan aktual di mana sektor sosial budaya seperti halnya yang kita lihat akhir-akhir ini, di mana identitas tertentu justru dijadikan alat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyeragaman politik atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, sehingga dapat mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, toleran antar sesama dan menjunjung tinggi gotong royong sebagai bagian untuk memperkuat ketahanan nasional,” tutur Karsiyanto.

Pembangunan sosial, lanjut Karsiyanto, memiliki arti penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya. Hal tersebut merupakan potensi bangsa yang perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa sebagai modal untuk menjadi negara maju dan moderen. Untuk itu, melihat dinamika sosial budaya yang intensitas dan eskalasinya sangat tinggi, melalui Olah Sismennas ini para peserta PPRA LVI dilatih untuk menjadi pimpinan nasional mampu berpikir yang komprehensif, integral dan holistik, dapat berkoordinasi dengan lintas sektoral serta mampu mengambil keputusan yang tepat pada situasi dan kondisi krisis. Pembukaan Olah Sismennas yang ditandai dengan penyematan tanda peserta Olah Sismennas secara simbolis ini kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Olah Sismennas.[FR]



Peserta SIMAN dari Lemhannas RI dan Kementerian Desa PDTT berfoto bersama Ketua dan Wakil Ketua SIMAN Pusat

Lemhannas Turut Aktif dalam Tim SIMAN

(Sinergi Media Sosial Aparatur Negara)

Lemhannas RI mengirimkan 26 Aparatur Sipil Negara dan instansi tersebut untuk mengikuti Pelatihan Kaderisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) di Gedung Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pertahanan RI pada Jumat (8/9). Kegiatan diawali dengan sambutan dari Wakil Ketua SIMAN Pusat, M. Fariza Y. Irwandi, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama, membahas tentang latar belakang dan urgensi pembentukan SIMAN Kementerian dan Lembaga. Tim SIMAN Pusat yang terdiri dari 78 kementerian dan lembaga diketuai oleh Laksda TNI

I Nyoman Nesa, berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Menurut M. Fariza, latar belakang pembentukan Tim SIMAN karena adanya program, kinerja dan prestasi Pemerintah yang harus disosialisasikan dengan masif, terutama di media sosial. Permasalahan lain yang melatarbelakangi terbentuknya Tim SIMAN karena adanya respon negatif oleh kelompok “haters”, serta maraknya penyebaran berita hoax di masyarakat.

Tantangan saat ini yang harus dihadapi oleh Tim SIMAN yakni harus mampu mengkomunikasikan dan menerjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam bahasa

komunikasi 'kekinian' yang mudah dimengerti dan populer. Selain itu keberadaan Tim SIMAN diharapkan mampu menangkal isu negatif terkait kementerian dan lembaga, dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan menyebarluaskan ke publik agar pemberitahuan positif lebih dominan.

Pemaparan materi kedua oleh salah seorang Wartawan Senior, Irawan Ariefyanto menyampaikan tentang peran strategis media sosial dalam pembentukan opini. Irawan mengatakan bahwa di masa sekarang, sosial media sudah menjadi salah satu penentu sumber informasi publik, dan pembentuk opini masyarakat. Di sela-sela kegiatan pelatihan, dihadirkan pula seorang pembicara dari tim kreatif SIMAN Pusat, Nurul Suci yang mengajarkan kepada para peserta pelatihan cara membuat meme menarik dan viral. Meme menjadi salah satu konten media sosial yang cukup digandrungi di kalangan warganet.

Tindak lanjut dari pembentukan tim SIMAN dari masing-masing kementerian dan lembaga yakni para anggota akan tergabung dalam sebuah grup whatsapp yang di dalamnya terdapat salah seorang dari anggota tim SIMAN pusat. Setiap harinya para anggota akan dikirimkan konten-konten positif terkait kementerian dan lembaga negara, yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai akun media sosial pribadi masing masing anggota, seperti Facebook, Instagram, twitter dan Youtube. Hal tersebut diharapkan dapat menimbulkan sentimen positif di dalam monitoring media.

Lemhannas RI sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi menyelenggarakan pengkajian strategis sebagai masukan Presiden dalam pengambilan kebijakan atau dikenal dengan istilah "think tank"-nya presiden, merasa perlu untuk turut

aktif memerangi berbagai isu negatif terhadap kinerja pemerintah, serta maraknya penyebaran hoax di masyarakat. Bergabungnya Lemhannas RI sebagai tim SIMAN juga menjadi peluang bagi lembaga ini untuk memantau isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat terutama melalui media sosial. Terbentuknya Tim SIMAN juga memberikan dampak positif bagi tiap-tiap kementerian dan lembaga karena dapat saling menjalin kerja sama yang baik demi kemajuan seluruh lembaga dan kementerian negara.[AS]

Tantangan saat ini yang harus dihadapi oleh Tim SIMAN yakni harus mampu mengkomunikasikan dan menterjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam bahasa komunikasi 'kekinian'



Peserta SIMAN dari berbagai kementerian dan lembaga pada saat pemaparan materi

Pra Seminar PPSA XXI

Bicarakakan Aktualisasi Pancasila



Andy Yentriani, S.So, M.A, menjelaskan paparannya mengenai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan sebagai awal jalannya diskusi



Aviani Malik dan Brigjen Pol Drs. Firi Bahri, M.Si bertindak sebagai moderator dalam RTD Pra Seminar PPSA XXI

Peserta PPSA XXI menggelar RTD (Round Table Discussion) pada Kamis (14/9) di Ruang Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III, Lemhannas RI. RTD Pra Seminar yang mengangkat tema “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional” tersebut dimoderatori oleh perwakilan peserta PPSA XXI Lemhannas RI, Brigjen Pol Drs. Firi Bahri, M.Si. dan Aviani Malik.

Dalam diskusi yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tersebut,

terdapat empat narasumber yaitu Tokoh Pendidikan Prof. Dr. Indria Samego, M.A, Intelektual TNI Brigjen TNI (Purn) Dr. Saafroedin Bahar, Praktisi dari Klinik Pancasila Dr. Dodik dan Tokoh Pendidikan Dr. Nani Nurrahman Sutojo.

Sebelum diskusi dimulai, Prof. Dr. Reni Mayerni selaku ketua seminar membacakan laporan tentang kegiatan RTD yang merupakan rangkaian dari acara seminar yang akan dihelat pada 16 November 2017 mendatang. Reni menyampaikan bahwa tujuan RTD Pra Seminar ini adalah untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai isu pendidikan di Indonesia saat ini.

“Round Table Discussion pada hari ini dengan tujuan diperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi saat ini terkait dengan isu pendidikan kita. Pada tahapan ini para pihak yang terlibat dalam seminar dapat menampilkan fakta-fakta obyektif

terkait dengan sistem pendidikan kita baik yang positif maupun yang negatif serta pengaruhnya terhadap kesatuan dan persatuan bangsa,” jelas Reni.

Dalam sambutannya, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang juga bertindak sebagai keynote speaker mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, ber-negara dan berbangsa.

“Sebagai dasar negara Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipe-domani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa yang memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh berjalannya waktu,” ungkap Letjen



Foto bersama para narasumber RTD Pra Seminar PPSA XXI Lemhannas RI

TNI (Purn)Agus Widjojo.

Jalannya rangkaian diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr (Han) dan Andy Yentriani, S.Sos., M.A. Dalam paparan mengenai Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan, disebutkan bahwa berdasarkan survey dari sebanyak 1600 siswa yang tergabung dalam organisasi rohani islam di sekolah-sekolah, 6% menyatakan setuju dan mendukung ideologi kelompok negara ISIS dan 33% meyakini para terdakwa teroris seperti Amrozi adalah contoh muslim yang melaksanakan jihad.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan untuk memperkokoh NKRI yang diharapkan dapat menghasilkan sistem pendidikan yang efektif, materi pendidikan yang terintegrasi dan dilengkapi dengan kearifan lokal, guru dan tenaga kependidikan dengan pemahaman kebangsaan yang mumpuni dan terampil dalam metodologi, lingkungan pendidikan yang kondusif serta metode dan

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan untuk memperkokoh NKRI yang diharapkan dapat menghasilkan sistem pendidikan yang efektif dan materi pendidikan yang terintegrasi.

pedekatan pengajaran yang reflektif dan variatif.

Rangkaian diskusi selanjutnya, Indria Samego menjelaskan bahwa keadaan masyarakat Indonesia saat ini perlu untuk diberi materi mengenai gagasan tentang keindonesiaan berikuk perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, lanjut Indria, Indonesia yang cukup patrimonial ini perlu adanya teladan-teladan dari para pemimpin untuk dijadikan contoh pada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula mengenai konsep perbedaan yang memiliki keterkaitan dengan ketahanan nasional. Selama ini, jelas Dodik, masyarakat hanya menghadapi perbedaan padahal seharusnya kita harus merayakan tentang perbedaan, membicarakan soal kesamaan, mengelola persatuan, serta mempelajari manajemen konflik tanpa mempelajari manajemen harmoni. Hal dasar tersebut menjadi rekomendasi dalam RTD yang diselenggarakan oleh peserta PPSA XXI.

RTD ini dilanjutkan dengan diskusi lebih lanjut tentang aktualisasi Pancasila dalam bidang pendidikan, sesi tanya jawab dan pemberian cenderamata untuk para narasumber.

Turut hadir dalam RTD tersebut adalah para Peserta PPSA XXI, PPRALVI, Tenaga Profesional, Tenaga Ahli Pengkaji, Sejumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI, perwakilan Universitas Negeri dan Swasta, Sekolah Kedinasan di lingkungan TNI dan ASN, Akademi dan Asosiasi Kepemudaan, serta Kepala Sekolah SMA yang terpilih di Jakarta berjumlah sekitar 375 orang.

Damiyem Elita Devi

Staf Deputi Pendidikan Lemhannas RI

Sosok Sederhana di Balik Pegawai Teladan Lemhannas 2017

Figur seorang ayah menjadi inspirasi bagi wanita berusia 33 tahun yang akrab disapa Devi ini. Matanya selalu berkaca-kaca setiap mengingat bagaimana kerja keras sang Ayah untuk mendukung setiap anggota keluarganya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Berkat ketekunan serta pengabdianya selama 15 tahun di Lemhannas RI, mengantarkan Damiyem Elita Devi menyandang predikat Pegawai Teladan Lemhannas 2017. Akan tetapi dengan kerendahan hati ia menjawab, “Saya juga gak tahu bagaimana cara penilaiannya, semua prosesnya begitu cepat, saya tiba-tiba diajukan, ikuti wawancara taunya terpilih. Saya pikir banyak pegawai lainnya yang lebih kompeten dari saya.”

Selama kurun waktu tujuh tahun berstatus sebagai tenaga honorer di Lemhannas RI semenjak tahun 2002, tak mengurangi semangat Devi untuk mengikuti tes CPNS di tahun 2009. Wanita kelahiran tanah Bengkulu ini kini bekerja sebagai staf Pengatur Administrasi di bawah Direktorat Operasi Pendidikan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI. Baginya, Lemhannas RI sudah menjadi rumah kedua. Rekan kerja serta atasan sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri.

Setiap harinya Devi bertanggung jawab membantu proses administrasi untuk mendukung kegiatan pendidikan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) dan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), serta membantu berjalannya kegiatan utama Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), juga seminar. Giat dan tekun dalam menjalankan pekerjaan menjadi kunci keberhasilannya meraih gelar Pegawai Teladan Lemhannas 2017.

Menurut Devi selama bekerja di Lemhannas RI, merupakan suatu kesempatan untuk belajar dan menggali ilmu yang tidak pernah ia dapatkan di bangku Sekolah Menengah Kejuruan. “Di sini, alhamdulillah saya bisa banyak mendapatkan pelajaran, seperti mengetahui bagaimana cara menyusun laporan, sistem pengadministrasian, ya juga mengetahui materi-materi yang dipresentasikan oleh peserta pendidikan,” Devi menambahkan. Seperti pada saat mendampingi para peserta PPRA dan PPSA, ia mengetahui apa keunggulan negara lain dibandingkan negara sendiri.

Dari kesempatan itu pula, ia melihat bahwa pendidikan merupakan investasi yang penting untuk mengembangkan wawasan dan potensi diri. Ia masih menggenggam erat cita-cita yang sama seperti

Pendidikan memang penting,
namun anak-anak saya memiliki
jalan hidup yang lebih panjang dari
saya, untuk itu saya memprioritaskan
untuk mengurus anak-anak sampai
mereka bisa lebih mandiri bila saya
menempuh pendidikan nanti

saat masuk ke lembaga ini lima belas tahun yang lalu, yaitu menempuh jenjang studi ke perguruan tinggi. Akan tetapi, sampai saat ini ia belum bisa duduk di bangku kuliah karena ia memprioritaskan pendidikan bagi anak-anaknya. “Pendidikan memang penting, namun anak-anak saya memiliki jalan hidup yang lebih panjang dari saya, untuk itu saya memprioritaskan untuk mengurus anak-anak sampai mereka bisa lebih mandiri bila saya menempuh pendidikan nanti,” ujar ibu yang kini sudah memiliki dua anak tersebut.

Sebagai seorang *working mom*, kerap kali kedua anak Devi mengeluhkan kesibukan bundanya, terlebih jika harus lembur. Meskipun berat harus membagi waktu antara keluarga dan karir, namun Devi tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Jarak yang harus ditempuh dari kediamannya di Cileungsi menuju kantor, bukanlah menjadi kendala bagi ibu dua anak ini untuk mengabdikan diri di Lemhannas RI.[AS]





Pendeta Sapta Siagian MTh

Alumni Lemhannas RI PPRA 54 Tahun 2016

Aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia tidaklah muncul berdiri sendiri, tapi dia memiliki keterkaitan dan pengaruh dengan fenomena lain yang muncul baik di tingkat global, regional, nasional dan lokal. Pada tingkat global, munculnya Ledakan Bom di Inggris hingga Ledakan Bom di Halte kampung Melayu serta pertempuran di Marawi yang didukung ISIS di Filipina serta transformasi gerakan pemikiran keagamaan dari luar negeri turut mempengaruhi munculnya radikalisme dan terorisme di tingkat nasional. Pengaruh lingkungan strategis global dan nasional berdampak terhadap ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini karena lingkungan strategi global, regional dan nasional yang tidak kondusif akan memicu munculnya perilaku radikal dari individu, kelompok dan organisasi tertentu. Oleh sebab itu, kebijakan penanaman Nilai-Nilai

Pancasila dan UUD NRI 1945 harus melihat peluang dan kendala yang ada. Hal ini penting untuk menghindari resistensi dari sebagian kelompok yang masih memandang penanaman nilai Pancasila bagian dari kebijakan Orde Baru, sehingga seolah-olah akan kembali membangkitkan Orde Baru. Kebijakan penanaman nilai Pancasila harus bisa mengoptimalkan segenap peluang yang ada untuk mengatasi kendala pelaksanaan program penanaman Nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

Faktor lain yang mempengaruhi munculnya terorisme global adalah adanya subordinasi dan kooptasi yang dilakukan oleh aktor tertentu melalui konspirasi intelejen dan aparat militer dengan memanfaatkan kelompok ini, sehingga terjebak dalam radikalisme aksi teror dan konflik horizontal di beberapa daerah. Dengan demikian, munculnya radikalisme dan terorisme tidak lepas dari faktor global. Pasca pemboman WTC New York tahun 2001, muncul persepsi seolah Islam menjadi ancaman bagi kelompok lain. Dominasi sistem ekonomi kapitalisme liberalisme, hegemoni negara besar terhadap rezim-rezim Timur Tengah telah memicu munculnya kelompok-kelompok radikal seperti ISIS di Suriah dan Iraq, Boko Haram, Jamaah Islamiyah dan lainnya

Permasalahan Radikalisme yang mendunia

Dalam konteks regional, munculnya aksi radikalisme dan terorisme sudah mulai merambah kawasan Asia Tenggara. Indonesia dengan jumlah umat Islam terbesar di kawasan Asia Tenggara, seolah menjadi tempat baru bagi munculnya gerakan gerakan radikal semacam ISIS dan Jamaah Islamiyah. Hasil penelitian Rizal Sukma tentang fenomena radikalisme dan terorisme pasca Bom WTC New York, menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara dan Indonesia memegang peranan penting dalam perang melawan terorisme. Kelompok-kelompok radikal teroris banyak muncul dan berkembang di negara kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Thailand.

Dalam Perkembangan Nasional radikalisme dan terorisme tumbuh dikarenakan oleh ketidakadilan global. Kebijakan (standar ganda) luar negeri AS terhadap negara-negara Islam (timur tengah) menimbulkan reaksi keras dari kelompok Islam militan Indonesia terhadap Negara-negara barat (USA). Reaksi inilah yang pada gilirannya memicu kelompok Islam Militan melakukan aksi kekerasan dan ancaman teror sebagai bentuk perlawanan mereka. Di samping itu sejak tumbangnya Rezim Orde

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme

Baru pada tahun 1998, terjadi masa peralihan dengan semangat reformasi total, ini membuka ruang bagi menjamurnya organisasi ekstrimis dengan beragam karakternya. Keberadaan organisasi ini dinilai membahayakan, sebab tidak jarang dalam aktivitasnya selalu menebarkan kebencian, teror dan aksi kekerasan. Realitas ini semakin menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme mengancam semangat toleransi beragama yang menjadi ciri khas Islam Indonesia. Radikalisme tumbuh berkembang di Indonesia disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Ada beberapa peluang sekaligus kendala dalam program implementasi penanaman Nilai-Nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang harus diperhatikan. Beberapa peluang tersebut di antaranya masih dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara yang diyakini kebenarannya. Meskipun ada sebagian orang yang sinis terhadap Pancasila, tapi mereka juga belum mendapatkan nilai baru sebagai alternatif pengganti Pancasila. Munculnya fenomena radikalisme terorisme dalam satu dasawarsa belakangan ini, konflik horizontal di berbagai daerah, membuat masyarakat memiliki kesadaran kembali melirik



Pancasila dan UUD 45 untuk dijadikan pedoman dan pandangan hidup dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mayoritas umat muslim penduduk Indonesia adalah Islam moderat, dan ini bisa menjadi modal sosial dalam mencegah tumbuhnya radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat. Selain itu, komitmen pemerintah dalam

pemberantasan terorisme melalui pembentukan BNPT, Densus 88 dan dengan dukungan anggaran besar untuk program deradikalisasi terhadap gerakan gerakan radikalisme dan terorisme. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah perlunya nilai kearifan dan budaya lokal yang sangat toleran, humanis, gotong royong, pluralis bisa menjadi kekuatan dalam mencegah radikalisme dan terorisme.



Kisah Yu Timah

Beberapa waktu yang lalu, kita bersama-sama dikesankan oleh kisah Yu Timah. Ia salah seorang penerima program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang kini sudah berakhir. Empat kali menerima SLT selama satu tahun jumlah uang yang diterima Yu Timah dari pemerintah sebesar Rp 1,2 juta.

Rumah Yu Timah hanya berlantai tanah, berdinding anyaman bambu, tak punya sumur sendiri. Bahkan status tanah yang ditempati gubuk Yu Timah adalah bukan milik sendiri. Di usianya yang menginjak lima puluhan, Yu Timah kini hidup sendiri dan sebatang kara.

Dulu semasa masih muda dan bertenaga, Yu Timah sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Namun, seiring usianya yang terus meningkat, Yu Timah sudah tak mampu lagi bekerja. Saat dia kembali ke kampung halamannya, para tetangga bergotong royong membuatkan gubuk untuk Yu Timah dan ibunya di atas tanah tetangga. Meski sangat miskin, Yu Timah tetap ingin mandiri, lalu ia berjualan nasi bungkus.

Meski di tengah keterbatasan, Yu Timah masih menabung di bank. Setiap harinya dia menabung 5 hingga 10ribu setiap bulan. Namun setelah menjadi penerima SLT Yu Timah bisa setor tabungan hingga mencapai 250ribu. Sampai suatu ketika, ia menarik uang tabungan untuk berkorban. Dengan status sosial dan ekonominya, Yu Timah tidak wajib untuk berkorban. Akan tetapi dia tetap teguh untuk berkorban, meski dalam keadaan yang terbatas, ia tetap ikhlas untuk menjalankan perintah agama.

Dengan harta yang sangat terbatas, Yu Timah mengorbankan hampir seluruh hartanya. Ia tidak membelanjakan hartanya dengan makanan, televisi, pakaian, atau sekadar meningkatkan taraf hidupnya. Meski sudah ribuan tahun jaraknya,

namun Yu Timah tetap mengingat pesan dan ajaran nabi Ibrahim dalam berkorban harta yang paling berharga.

Berbagai masalah yang menimpa bangsa kita saat ini, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan bahkan akhlak, disebabkan ketidakmampuan kita dalam mengorbankan harta paling berharganya.

Inspirasi Nabi Ibrahim Dalam Ibadah Qurban

Ketika seorang putra Ibrahim telah mencapai usia dewasa, Allah hendak menguji kesetiaan Ibrahim terhadap perintah-perintahNya melalui sebuah mimpi tentang penyembelihan anak. Keimanan Ibrahim, yang telah berhasil menghadapi ujian-ujian sebelumnya, sama sekali tidak berubah sewaktu menerima perintah ini. Ibrahim mengajak putranya berangkat untuk melaksanakan perintah Allah, ia tidak sedikitpun mengeluh ataupun memohon keringanan dari Allah tentang perintah ini melainkan ia melaksanakan sebagaimana yang

Allah perintahkan.

Ketika Ibrahim membaringkan putranya untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan persetujuan dari sang putra. Ibrahim berkata: “Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka sampaikanlah apa pendapatmu.” Putranya menjawab, “Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; dengan berkenan Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”

Tatkala putranya telah merelakan diri serta Ibrahim telah bersiap mengulurkan tangan untuk menyembelih putranya, seketika Allah memanggil Ibrahim supaya menahan tangannya, sebab tindakan ini membuktikan bahwa Ibrahim bersedia melaksanakan apapun untuk Allah, juga membuktikan wujud seorang hamba yang berbakti serta seorang sosok yang terpercayanya bagi Allah. Kemudian Ibrahim mendapati seekor sembelihan besar sebagai kurban pengganti putranya.

Berkorban adalah bentuk pengendalian diri. Ia tidak pernah memikirkan akibat dari perbuatannya. Berbagai masalah yang menimpa bangsa kita saat ini, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan bahkan akhlak, disebabkan ketidakmampuan kita dalam mengorbankan harta paling berharganya. Sosok Yu Timah tentu saja menjadi inspirasi bagi tiap orang, untuk mau mengorbankan hal terbaik yang dimiliki dan diberikan kepada orang lain agar berbuah kepada kebaikan.[Diolah dari berbagai sumber]



Penyesalan Indonesia atas Krisis Kemanusiaan di Myanmar

Sejak akhir bulan Agustus 2017 lalu, kekerasan terbaru meletus di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang banyak dihuni Muslim Rohingya. Gelombang kekerasan baru ini menandai meningkatnya konflik sejak Oktober 2016 lalu ketika milisi Rohingya melakukan serangan dengan skala yang lebih kecil. Para pengungsi menyebutkan, aparat keamanan Myanmar dan kelompok militan radikal Buddha membakar desa-desa mereka. Sementara itu, Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa pasukan keamanan sekadar mengambil langkah balasan terhadap

serangan sebelumnya terhadap lebih dari 20 pos polisi oleh milisi Rohingya. Bentrokan susulan sesudah itu membuat banyak warga sipil baik Islam maupun Buddha, lari menyelamatkan diri dari desa-desa mereka.

Setelah serangan milisi pada bulan Oktober 2016, pihak militer Myanmar melakukan kembali melakukan operasi militer, dan banyak warga Rohingya menyebutkan bahwa dalam operasi itu pasukan keamanan melakukan tekanan kepada masyarakat. Sebagai respon dunia, PBB menyebut serangan balasan dari militer terhadap etnis Rohingya pada

Oktober 2016 lalu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menanggapi banyaknya permintaan dan tuntutan masyarakat agar pemerintah Indonesia berperan aktif untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di negara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya telah menugaskan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan di wilayah negara itu. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (03/09)

malam. Menlu Retno sendiri telah berangkat ke Myanmar pada Minggu sore.

“Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga, termasuk Muslim di Myanmar,” kata Presiden.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Aung San Suu Kyi untuk membicarakan upaya penyelesaian masalah Rohingya. Dalam pertemuan tersebut, Menlu menyerahkan Formula 4+1, yang isinya antara lain; mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan



Indonesia negara yang berpengaruh di Asia Tenggara. Indonesia dinilai bisa menjadikan bantuan sebagai salah satu 'kartu' dalam berdiplomasi.

kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama, serta pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

“Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine dan agar Indonesia membantu,” jelas Menlu Retno kepada Aung San Suu Kyi, seperti tertulis dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Selain bertemu pemerintah Myanmar, Presiden Jokowi mengatakan dirinya juga menugaskan Menlu

Retno Marsudi untuk menjalin komunikasi intensif dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan -mantan Sekjen PBB.

Pengamat politik Asia Tenggara dari lembaga pemikir CSIS di Jakarta, Philips Vermonte, menilai diplomasi Indonesia kepada pemerintah Myanmar amat penting untuk menghentikan lingkaran kekerasan dan menciptakan suasana kondusif bagi warga Rohingya. “Karena Indonesia punya modal untuk didengar Myanmar. Kita sudah lama membantu Myanmar dalam banyak

soal, termasuk tentang demokrasi dan bagaimana cara berpemilu,” kata Philips kepada BBC Indonesia.

Indonesia juga dinilai bisa menjadikan bantuan sebagai salah satu ‘kartu’ dalam berdiplomasi. Philips Vermonte mengungkapkan, Indonesia bisa saja ‘mengancam’ untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada Myanmar jika tidak menghentikan persekusi pada warga Rohingya karena akan berdampak ‘secara simbolik’ bagi Myanmar.

“Indonesia negara yang berpengaruh di Asia Tenggara. Biasa dianggap teman. Kalau Indonesia meninggalkan Myanmar, dampaknya bisa rumit bagi Myanmar,” tutur Philips. Sementara itu, sebagian umat Islam di Indonesia menyatakan kekecewaannya atas pemberitaan Rohingya di Myanmar. Maka berbagai cara pun dilakukan untuk mengungkapkannya, mulai dari menuai di media sosial hingga berdemonstrasi. Namun berbagai pihak menilai demonstrasi dan penggalangan massa ‘yang terlalu keras’ bukanlah jawaban untuk membantu etnis Rohingya.

[Dikutip dari www.bbc.com]



dibunuh oleh pembajaknya.

Hanya beberapa jam setelah serangan itu, pada Jumat (18/8) dini hari terjadi serangan kendaraan kedua di Cambrils, sebelah barat Barcelona. Seorang perempuan tewas dan polisi menembak mati lima tersangka penyerang, termasuk Moussa Oukabir (17), yang semula dilaporkan sebagai tersangka utama dalam serangan Las Ramblas. Oukabir dicurigai menggunakan dokumen kakaknya untuk menyewa kendaraan yang digunakan di Barcelona.

Pada Sabtu (19/8), petugas darurat Katalunia mengumumkan rincian baru tentang korban serangan. Antara lain jumlah korban serangan Barcelona sebanyak 13 orang tewas, 12 orang luka kritis, 24 orang luka berat, 11 orang luka agak ringan, dan 3 orang luka ringan. Sedangkan jumlah korban serangan di Cambrils sejumlah 1 orang tewas, 1 orang luka berat, 2 orang luka agak ringan, dan 1 orang luka ringan.

Sedangkan untuk daftar 12 tersangka teror yakni, enam tersangka jihadis ditembak mati oleh polisi di Cambrils, yakni Moussa Oukabir (17), Kata Aallaa (18), Mohamed Hycham (24), Younes Abouyaaqoub (22) pengemudi yang melakukan penabrakkan dalam serangan Las Ramblas, dan dua pria lain tidak disebutkan namanya. Sedangkan empat tersangka ditangkap di kota Ripoll, yakni Driss Oukabir (28) yang adalah kakak Moussa, yang menyerahkan diri untuk mengatakan bahwa dokumennya dicuri untuk menyewa kendaraan yang digunakan dalam serangan Las Ramblas; Sahal el-Karib (34), dan Mohammed Aalla (27), serta satu orang yang tidak disebutkan namanya di Alcanar, menyusul ledakan di sebuah rumah di sana pada Rabu. Polisi juga telah menahan dua pria, seorang Maroko dan seorang pria dari Melilla, Afrika utara. [Dikutip dari Kompas.com]

Serangan Berdarah di Barcelona

Serangan yang terjadi di beberapa lokasi berbeda di Barcelona, dalam waktu yang berdekatan diindikasikan sebagai serangan teroris. Jaringan sel teror yang beranggotakan 12 orang melancarkan serangan di dua tempat di Katalunia, Spanyol. Menurut keterangan polisi, para tersangka sudah mengumpulkan 120 tabung gas sejak enam bulan, dan berencana memenuhi tiga mobil dengan tabung-tabung gas yang akan diledakan dalam serangan besar. Namun nahas tabung-tabung yang disimpan di sebuah rumah di Alcanar itu meledak pada Rabu (16/8) malam.

Ledakan tersebut merusak sebuah rumah di Alcanar, kota kecil yang berada 200 km selatan Barcelona. Dalam kejadian tersebut satu orang meninggal. Menurut pernyataan seorang pejabat pemerintah Katalunia, sebuah jaringan sel teroris diduga bermaksud menggunakan tabung gas dalam serangan di Las Ramblas.

Gagal melancarkan aksi teror bom, para pelaku melanjutkan aksi mereka dengan menabrakkan mobil van ke kerumunan turis dan pengayuh

sepeda di kawasan Las Ramblas, Barcelona pada Kamis (17/8), yang mengakibatkan 13 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Pengemudi sempat melarikan diri setelah mobilnya terbalik. Namun polisi berhasil melacak keberadaan Younes Abouyaaqoub (22) yang diduga sebagai pengemudi mobil van telah buron selama lima hari ke daerah pedesaan dekat Barcelona.

Pada saat kejadian serangan di Las Ramblas, polisi menemukan van kedua, di Vic, sebuah kota kecil yang berjarak 80 km arah utara Barcelona, yang diduga disiapkan sebagai kendaraan pelarian. Sementara di kota Sant Just Desvern, pada Kamis (17/8) malam sebuah mobil melaju kencang ke arah petugas di sebuah pos pemeriksaan di pinggiran kota Barcelona. Beruntung, petugas berhasil melepaskan tembakan ke arah mobil tersebut. Seorang pria kemudian ditemukan tewas di kursi penumpang dengan luka tusukan. Menurut pernyataan petugas, korban tewas itu tidak terkait dengan serangan Las Ramblas, dan salah satu kemungkinan, mobil itu dibajak, dan pemiliknya



Bantahan Qatar Larang Pesawat Haji Riyadh Mendarat di Doha

Q dan Arab Saudi kembali berseteru setelah Riyadh menuding Doha tak membolehkan pesawatnya mengangkut jemaah haji setempat ke Mekah. Seperti dilaporkan Washington Post, 21 Agustus 2017. Otoritas Qatar, pada Senin (21/8), membantah tuduhan tersebut.

Pemerintah Doha mengatakan, pihaknya tak pernah melarang pesawat Saudi mendarat di Bandara Doha. Justru sebaliknya, sejak 1 Juni lalu kawasan kwarter Arab yakni, Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir yang telah memutus koneksi transportasi dengan Qatar dan melarang pesawat Qatar memasuki kawasan tersebut, serta menerapkan sejumlah sanksi.

Surat pernyataan tersebut dibuat Qatar setelah manajer maskapai Arab Saudi, Saleh al-Jasser, mengatakan bahwa pesawat-pesawat Saudi dilarang mendarat di Doha. Padahal, pihaknya sudah mengajukan ijin terlebih dahulu ke pihak berwenang di Qatar. “Pesawat-pesawat kami dilarang mendarat di Bandara Internasional Hamad, Doha, padahal kami sudah mengajukan permintaan untuk mendarat di sana,” ujar Saleh di Riyadh, kemarin.

Otoritas penerbangan sipil Qatar mengkonfirmasi, mereka telah menerima permintaan dari perusahaan penerbangan Saudi untuk izin mendarat dan telah mengarahkan perusahaan penerbangan tersebut ke kementerian urusan agama Islam “sesuai dengan praktik masa lalu”.

Ibadah haji itu tahun ini berubah menjadi titik pertarungan antara Arab Saudi dan Qatar, yang terkunci dalam krisis diplomatik setelah Doha dituduh sebagai negara yang mendukung terorisme dan ekstremisme. Namun, Doha dengan tegas lewat berbagai saluran diplomatiknya membantah seluruh tuduhan negara-negara Arab itu. Doha sebelumnya telah memberi label pengaturan ibadah haji saat ini “tidak logis” dan menuduh Arab Saudi mempolitisasi ibadah haji.

Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar pada 5 Juni lalu, yang menjadi krisis politik terburuk di Teluk dalam beberapa dasawarsa.

[Dikutip dari www.kompas.com dan www.pikiran-rakyat.com]

Uji Coba Nuklir Ke-6 Korea Utara Berbuntut Sanksi PBB



Minggu (03/09) terasa berbeda bagi orang-orang di kawasan Asia Timur ketika alat pendeteksi gempa mencatat guncangan dengan magnitudo 6,3 skala Richter terjadi di dekat lokasi uji coba nuklir Korea Utara di Punggyeri. Getaran lindu terasa hingga utara China dan sirene darurat dilaporkan berbunyi di Yanji, dekat perbatasan Korea Utara.

Menteri luar negeri Jepang, Taro Kono mengungkapkan keyakinannya

bahwa Korea Utara sedang melakukan uji coba nuklir keenamnya. Kono menyebut aksi itu “tidak dapat dimaafkan”. Hal ini diikuti pernyataan media pemerintah Korea Utara yang mengakui guncangan yang terjadi bukanlah gempa bumi. Sebagai catatan guncangan itu 9,8 kali lebih kuat dibandingkan ‘gempa’ yang diakibatkan uji coba nuklir kelima, beberapa waktu lalu.

Uji coba ini menggunakan bom hidrogen yang dipasangkan pada rudal jarak jauh. Bom hidrogen berkali-kali lebih kuat dibandingkan

bom atom. Bom hidrogen dibuat dari pencampuran berbagai atom untuk memuntahkan energi dengan kekuatan besar, sementara bom atom dibuat dengan memecah atom.

Presiden AS menyebut tindakan tersebut ‘berbahaya.’ yang sudah menjadi ‘ancaman besar dan memalukan’ termasuk bagi Tiongkok, koalisi terdekat Pyongyang.

“Amerika Serikat berencana menghentikan seluruh aktivitas perdagangan dengan negara yang berbisnis dengan Korea Utara,” kata Trump dalam cuitannya melalui akun



twitter. Korea Utara melakukan 90% aktivitas perdagangannya dengan Tiongkok.

Pasca uji coba senjata nuklir Pyongyang yang keenam kalinya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara. Sanksi terbaru sebagai “tamparan” untuk rezim Kim Jong-un ini berupa larangan bagi Korea Utara mengekspor tekstil. Negara tersebut juga dibatasi untuk impor minyak dan menjadikannya ilegal bagi perusahaan asing untuk

membentuk usaha patungan komersial dengan entitas Korea Utara.

Diberlakukannya sanksi ini dapat memangkas ekspor Korea Utara sebesar 90 persen. Larangan ekspor tekstil Korea Utara ini akan menyebabkan negara tersebut rugi sebesar US\$ 726 juta per tahun.

Rancangan atau resolusi sanksi yang diadopsi DK PBB diajukan oleh Amerika Serikat. Resolusi disahkan setelah Washington sepakat untuk merevisi draft resolusi atas tekanan Tiongkok dan Moskow. Tidak tinggal diam, Korea Utara menunjukkan pembangkangan yang selama ini menjadi merek dagang mereka. Korea Utara pun berjanji untuk melipatgandakan usaha untuk melawan apa yang dikatakannya sebagai ancaman invasi Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Korea Utara mengatakan bahwa resolusi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak sah untuk membela diri. Korea Utara pun menilai jika sanksi terbaru itu ditujukan untuk mencekik negara dan rakyatnya sepenuhnya melalui blokade ekonomi skala penuh.

Korea Utara mengancam Amerika Serikat dengan apa yang mereka sebut “rasa sakit terhebat”. Hal tersebut diungkapkan Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Han Tae-song, setelah DK PBB memberlakukan sanksi baru terhadap negeri pimpinan Kim

Jong-un itu. Han mengatakan, ia menolak tegas sanksi baru DK PBB yang disebutnya sebagai resolusi ilegal. “Langkah-langkah yang akan dilakukan DPRK (Korea Utara) akan membuat AS menderita rasa sakit terhebat yang pernah mereka alami dalam sejarah,” ujar Han dalam sebuah konferensi PBB di Jenewa, Swiss.

Setelah rentetan sanksi PBB menghancurkan ekonomi Pyongyang, para peretas atau hacker Korea Utara dilaporkan mencuri uang digital bitcoin dari Korea Selatan untuk disetorkan ke rezim Kim Jong-un. Mata uang virtual telah menjadi andalan negara komunis tersebut. Laporan perusahaan riset keamanan FireEye Inc menunjukkan peretas Korea Utara tengah membidik serangan ke bursa-bursa penukaran *cryptocurrency* di Korea Selatan. Mereka juga dilaporkan tengah menerobos situs berita bitcoin berbahasa Inggris serta mengumpulkan pembayaran tebusan bitcoin dari korban-korban malware Wanna Cry di seluruh dunia.

Sepanjang 2017, FireEye melaporkan setidaknya ada tiga bursa penukaran mata uang digital di Korea Selatan yang terkena serangan. Korea Selatan menjadi target pencurian bukan hanya karena jaraknya yang dekat dengan Korea Utara. Namun karena negara K-Pop ini merupakan salah satu pusat perdagangan tersibuk untuk mata uang digital pada 2017.

[Dikutip dari www.liputan6.com dan sindonews.com]

Langkah Sederhana Usir Stress Saat Bekerja

Di tengah hari, saat Anda sedang sibuk-sibuknya, tentunya tidak ada waktu untuk yoga atau meditasi. Rehat sejenak dari kesibukan pada hari itu untuk mengusir stres terasa mustahil. Tak perlu khawatir. Walau dua cara tadi cukup ampuh dan efektif mengusir stres, ada cara lebih mudah untuk melemaskan saraf agar tak selalu tegang, terutama saat Anda sedang bekerja.

Berikut ini terdapat delapan tips agar stress saat bekerja dapat berkurang:

1. Ketika leher merasa lelah

Coba duduk dengan posisi tegak, lalu lakukan stretching dengan memiringkan leher ke arah pundak secara perlahan, tahan selama 10 detik. Lakukan kembali beberapa kali.

2. Atasi pegal pada bagian pundak

Lakukan gerakan dengan posisi duduk tetap tegak. Angkat pundak ke atas hingga mendekati telinga, tahan selama 5 detik. Kemudian, turunkan kembali pundak pada posisi normal, ulangi lagi sehingga otot sekitar bahu bisa beraktivitas.

3. Saat mata terasa lelah

Coba olahraga mata dengan memutar bola mata ke kanan, kiri, atas dan bawah beberapa kali. Setiap 30 menit, coba alihkan pandangan mata dari komputer ke arah lain, misalnya ke jendela, jam dinding atau televisi yang terdapat di dalam ruangan guna mengistirahatkan mata sejenak.

4. Perhatikan juga asupan air Anda selama di kantor.

Dengan berjalan mengisi ulang air, Anda juga membiarkan otot-otot kaki lebih banyak bekerja.



5. Duduk dengan posisi yang baik dan benar.

Pastikan tinggi kursi dan meja sesuai dengan lengan penggunanya. Ketika kita duduk lurus dengan kaki rata di lantai, lengah harus berada pada sudut 90 derajat ketika mengetik di komputer. Sesuaikan tinggi kursi dan meja sesuai proporsi tubuh masing-masing.

6. Dapatkan cahaya matahari

Pencahayaannya langsung sinar matahari diyakini bisa meningkatkan produktivitas kerja. Tak hanya itu saja, ia juga bisa mengurangi kelelahan dan stress serta menghambat penuaan retina.

7. Menjaga kebersihan

Area kerja yang bersih dan rapi dapat membuat pikiran jadi jernih. Ruangan, meja kerja, dan pendingin ruangan (AC) yang jarang dibersihkan bisa menyebabkan pelbagai penyakit. Salah satunya, Legionellosis. Penyakit ini merupakan radang paru-paru yang disebabkan kuman Legionella pneumophila. Biasanya, kuman ini bisa berkembang biak pada sistem pendingin AC sentral.

8. Beristirahat sejenak.

Mengambil jeda saat bekerja merupakan hal penting untuk menjernihkan pikiran Anda. Meski sejenak, istirahat dengan mengalihkan diri ke hal di luar pekerjaan, dapat mengisi kembali energi kita. Beranjaklah dari kursi dan keluar ruangan setidaknya selama 10 menit. Hal ini bisa memulihkan diri kita dari ketegangan pekerjaan.



Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan penyampaian RAPBN 2018. Dalam pidatonya Joko Widodo merasa sangat yakin bahwa dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, serta pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia, sehingga akan menjadikan Indonesia semakin kuat dalam menghadapi persaingan Global.



Lemhannas RI Raih Penghargaan Buletin Terbaik Perpustakaan Nasional 2017

Newsletter Lemhannas RI mendapat penghargaan untuk kategori buletin pada Penganugerahan Penerbit, Majalah, Jurnal, Buletin, Buku dan Grey Literature yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Tahun 2017. Penghargaan diberikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando dan diterima secara langsung oleh Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI Mindarto yang disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 133 Tahun 2017. Acara digelar di International Book Fair, Jakarta Convention Center pada hari Minggu (10/9).



Pembekalan kepada Peserta Pendidikan Lemhannas RI oleh Wapres

Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebagai Lembaga Pendidikan Tertinggi secara formal bagi para calon pemimpin nasional harus dapat merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia memiliki empat tujuan nasional yang tertera di konstitusi yaitu memajukan negeri, memakmurkan bangsanya dengan adil, mencerdaskan bangsa, dan mencapai perdamaian dunia.

Penyembelihan Hewan Kurban dalam rangka perayaan Iduladha

Dalam Rangka Perayaan Hari Raya Iduladha 1438 H, Lemhannas RI menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada Senin (4/9) di Pelataran Parkir Timur Lemhannas RI. "Perayaan Idul Adha 1438 H oleh keluarga besar Lemhannas RI tahun ini mengangkat tema 'Dengan Hikmah Iduladha Kita Tingkatkan Solidaritas Sosial di Lingkungan Lemhannas RI'.



Evaluasi Dampak terhadap program Training of Trainers (T.o.T) Nilai-Nilai Kebangsaan

Bertempat di Ballroom Borneo, Hotel Novotel Balikpapan (27/7), kegiatan Evaluasi Dampak dibuka oleh Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto. Dalam sambutannya, disampaikan pula tujuan Evaluasi Dampak ini adalah untuk mengukur sejauh mana dampak perubahan sosial yang muncul dan bagaimana kontribusi alumni dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya masing-masing.



Kuliah Umum Menkopolhukam RI

Mengangkat tema "Peran Indonesia Sebagai Driving Force Stabilitas Politik dan Keamanan ASEAN", Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. menyampaikan kuliah umum kepada peserta PPRa LVI dan PPSA XXI Lemhannas RI di Ruang Auditorium Lemhannas RI, Jumat (11/8). Wiranto mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi-posisi yang penting dalam memegang kedudukan di ASEAN.

Setiap permasalahan yang terjadi di ASEAN, Indonesia selalu tampil aktif dan bahkan ikut serta dalam memelopori penyelesaian permasalahannya, hal ini menjadikan Indonesia sebagai driving force di ASEAN.





Lemhannas RI dan The Daniel K. Inouye APCSS Bicarakan Rencana Kerja Sama

James Hartsel, Direktur Sementara The Daniel K. Inouye Asia Pacific Center Security Studies (APCSS) melakukan diskusi dengan Lemhannas RI di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra, Lemhannas RI pada Selasa (8/8). Kunjungan yang merupakan pertama kalinya bagi The Daniel K. Inouye APCSS ini bertujuan untuk saling lebih mengenal peran masing-masing institusi dan merencanakan kerja sama dalam sebuah nota kesepahaman antara Lemhannas RI dengan APCSS di bidang stabilitas keamanan di Asia Pasifik.



Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi memberikan ceramah mengenai "Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global" di hadapan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI pada Senin (31/7) di Ruang NKRI Lemhannas RI. Ceramah tersebut membahas mengenai bagaimana politik Indonesia di luar negeri khususnya pada negara-negara yang sedang berkonflik dan akan memiliki dampak terhadap Indonesia. Dalam ceramahnya, Retno Marsudi menyampaikan empat prioritas politik Indonesia di luar negeri yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan WNI, diplomasi ekonomi, serta peran regional dan global Indonesia.



Kunjungan High Commissioner Fiji untuk Papua New Guinea ke Lemhannas

Marsda TNI(Purn) Surya Dharma, S.I.P. menerima kunjungan dari High Commissioner Fiji yang dipimpin oleh Commodore H.E Esala Teleni di Gedung Nusantara Dua Lembaga Ketahanan Nasional RI pada Rabu (16/08).Kunjungan ini membahas mengenai bagaimana kerjasama antara Indonesia dengan Fiji dalam berbagai aspek nasional yang berfokus pada tantangan regional dan ancaman global serta menangani bencana alam.

